



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.132, 2017

KEJAKSAAN. Rencana Kerja. Tahun 2017.

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER- 001/A/JA/01/2017

TENTANG

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, perlu menyusun Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2017;
- b. bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama kurun waktu satu tahun, yang merupakan komitmen Kejaksaan Republik Indonesia untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan;
- c. bahwa penetapan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017 dilaksanakan pada tahun ketiga Pemerintahan Kabinet Kerja, sehingga dalam pelaksanaannya perlu menyesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Rencana

- Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
14. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1459);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017.

## Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (2) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017, merupakan arah kebijakan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

## Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017, terdiri atas:
  - a. Buku I tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini; dan
  - b. Buku II tentang Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.
- (2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Bab I Pendahuluan, terdiri atas:
    1. latar belakang;
    2. tujuan; dan
    3. sistematika;

- b. Bab II Arah Kebijakan Pemerintah di Bidang Hukum dalam Pembangunan Nasional, terdiri atas:
  - 1. tema;
  - 2. strategi pembangunan; dan
  - 3. prioritas pembangunan nasional, program prioritas dan kegiatan prioritas pembangunan nasional;
- c. Bab III Arah Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017, terdiri atas:
  - 1. tema pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2017;
  - 2. sasaran pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2017;
  - 3. arah kebijakan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2017; dan
  - 4. rekomendasi hasil rapat kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2016;
- d. Bab IV Program Kerja dan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017, yang memuat 8 (delapan) program, yaitu:
  - 1. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
  - 2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 3. program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4. program pendidikan dan pelatihan aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 5. program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan;
  - 6. program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum;
  - 7. program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus, pelanggaran hak asasi

- manusia yang berat dan perkara tindak pidana korupsi; dan
8. program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara; dan
- e. Bab V Penutup.

### Pasal 3

Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017 merupakan pedoman bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri serta Atase Teknis Kejaksaan Republik Indonesia pada Perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing; dan
- b. menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun masing-masing satuan kerja/bidang/unit kerja sebagaimana tercantum dalam formulir Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

### Pasal 4

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membuat laporan keuangan dan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara berjenjang, yaitu:
  - a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri;
  - b. Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;

- c. Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan;
  - d. Atase Teknis Kejaksaan Republik Indonesia pada Perwakilan Indonesia di luar negeri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan;
  - e. Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung kepada Jaksa Agung Muda Bidang masing-masing; dan
  - f. para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan kepada Jaksa Agung.
- (4) Akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:
- a. laporan bulanan adalah tanggal terakhir dari setiap bulan;
  - b. laporan triwulan pertama adalah tanggal 31 Maret;
  - c. laporan triwulan kedua adalah tanggal 30 Juni;
  - d. laporan triwulan ketiga adalah 30 September; dan
  - e. laporan triwulan keempat adalah tanggal 31 Desember.
- (5) Selain laporan keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), laporan harus segera disampaikan secara insidentil atas permintaan pimpinan dan/atau atasan langsung.

#### Pasal 5

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Cq. Kepala Biro Perencanaan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja Triwulanan dan Tahunan Jaksa Agung Republik Indonesia, untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 7

Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2017

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I  
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER-001 /A/JA/01/2017  
TENTANG  
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2017

**RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 yang memuat Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan serta Rencana Strategis Kejaksaan 2015-2019. Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan ini merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dalam pembangunan di bidang hukum.

Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan ini, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah 2017 yang menggunakan pendekatan holistik tematik, integratif dan spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follow program* dengan cara hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian program prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan, yang merupakan program prioritas adalah penanganan perkara tindak pidana, baik perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana khusus, sehingga tugas dan fungsi ini yang harus mendapatkan prioritas dalam penganggarannya. Hal ini merupakan kebijakan Pemerintah mengingat keterbatasan pendapatan negara dari sektor pajak dan juga pendapatan negara bukan pajak apabila dibandingkan dengan kewajiban pemerintah untuk membiayai seluruh belanja Kementerian/Lembaga dan juga kewajiban pembayaran hutang negara yang cukup tinggi. Oleh karena itu dalam Tahun Anggaran 2017, tidak semua tugas dan fungsi Kejaksaan dibiayai secara merata.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2017 memuat program prioritas Kejaksaan dan kerangka pendanaannya.

## **B. TUJUAN**

Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2017 mempunyai tujuan untuk :

1. Pedoman bagi seluruh Pimpinan Bidang /Satuan Kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien dan akuntabel.
2. Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 baik kegiatan yang bersifat prioritas nasional maupun prioritas Kejaksaan.
3. Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.
4. Pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2017.

### C. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL yang memuat tentang Tema dan Strategi Pembangunan, Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional.
- BAB III : ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 yang memuat tentang Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2017, Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2017, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2017 dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2016.
- BAB IV : PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2017, yang memuat tentang 8 (delapan) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan, Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan. .
- BAB V : PENUTUP

**BAB II**  
**ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM**  
**DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL**

**A. TEMA DAN STRATEGI PEMBANGUNAN**

**1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) DAN NAWACITA**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Visi Misi Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang secara garis besar meliputi :

**VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015 – 2019**

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong“.

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) **MISI PEMBANGUNAN** yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berlandaskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019 tersebut disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

## **2. TEMA PEMBANGUNAN**

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 disusun dengan tema : “**MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH**” Tema ini adalah untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, sehingga fokus pembangunan pada infrastruktur.

## B. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi Pembangunan dirumuskan dalam : (1). Norma pokok pembangunan Kabinet Kerja, (2). Prioritas pembangunan yang dibagi ke dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi perlu dan (3). Penekanan (fokus) tahunan yang tercermin dalam tema pembangunan.

Norma Pembangunan Kabinet Kerja adalah :

1. Pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait.
2. Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak menyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah (*entitled society*).
3. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar.
4. Pembangunan tidak boleh merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem.
5. Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan.

Pemerintah juga memfokuskan pada 3 Dimensi Pembangunan yaitu :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang dijabarkan dalam :
  - a. Revolusi Mental (Nawacita ke 8 & 9).
  - b. Pendidikan
  - c. Kesehatan
  - d. Perumahan
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang dijabarkan dalam :
  - a. Kedaulatan Pangan
  - b. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
  - c. Kemaritiman dan Kelautan
  - d. Pariwisata dan Industri (a, b, c, d merupakan Nawacita ke 6 & 7).
3. Dimensi Pemerintahan dan Kewilayahan, yang dijabarkan dalam :
  - a. Antar Kelompok Pendapatan
  - b. Antar Wilayah : (1). Desa ; (2). Perbatasan ; (3). Tertinggal ; (4). Perkotaan  
(a dan b merupakan Nawacita ke 3).

Di samping itu Pemerintah juga menyampaikan Kondisi Perlu yaitu :

1. Kepastian dan Penegakan Hukum (Nawacita ke 4).
2. Keamanan dan Ketertiban (Nawacita ke 1).
3. Politik dan Demokrasi (Nawacita ke 9)
4. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi (Nawacita ke 2).

**C. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2017 yang terkait dengan Kejaksanaan selaku Lembaga Penegak Hukum yaitu :

**1. PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT**

**1.1. REVOLUSI MENTAL**

Revolusi Mental merupakan upaya mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku masyarakat yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan yang religius. Revolusi Mental harus menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh bangsa yang ditempuh melalui peningkatan peran dan efektivitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan serta pranata sosial budaya di masyarakat dengan mengubah pola pikir dan perilaku lama yang tidak sesuai dengan cita-cita membangun bangsa yang maju, modern dan mandiri. Revolusi Mental mendorong Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang unggul, yang berprestasi tinggi, produktif, dan berdaya saing. Untuk itu pembangunan Revolusi Mental bertumpu pada pilar Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Revolusi Mental mengandung nilai-nilai esensial yang harus diinternalisasi baik pada setiap individu maupun bangsa, yaitu :

- a. Integritas, yang mencakup sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, sportif, adil, serta taat hukum dan aturan.

- b. Etos Kerja, yang mencakup sikap optimistik, kerja keras, berprestasi, gigih/pantang menyerah, mandiri, produktif, hemat, kreatif, inovatif dan mengutamakan pelayanan publik prima.
- c. Gotong Royong yang mencakup kerja sama, kesetiakawanan, solidaritas, menghargai perbedaan dan kemajemukan, toleransi, saling menghargai/menghormati, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

#### **ARAH KEBIJAKAN REVOLUSI MENTAL**

Arah Kebijakan Revolusi Mental yang terkait dengan Kejaksanaan yaitu :

- **REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN**

- a. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif).
- b. Program pembangunan dan belanja Pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif.
- c. Penerapan disiplin, *reward and punishment* dan sistem merit dalam birokrasi.

- **PENEGAKAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN POLITIK**

- a. Penegakan hukum, kode etik dan disiplin aparat Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat.
- b. Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundang-undangan untuk mendorong kreativitas masyarakat.
- c. Penanganan perkara secara transparan dan memuaskan.
- d. Pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik.



## **1.2. PROGRAM PRIORITAS**

Pembangunan Revolusi Mental dilakukan melalui pendekatan terintegrasi, yaitu setiap saran revolusi mental melalui pelaksanaan program prioritas secara sinergis, melibatkan seluruh aspek terkait, terpadu dan memiliki kejelasan lokus.

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas Revolusi Mental, seluruh sektor memberikan dukungan secara sinergis dan terintegrasi melalui pencapaian sasaran kegiatan masing-masing.

Program prioritas penegakan hukum dan kelembagaan politik, selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan, antara lain :

- a. Penegakan disiplin dan kode etik aparat pemerintah dan penegak hukum, dengan sasaran :
  - Penerapan gerakan aparat menuju indonesia ramah di 34 Provinsi.
  - Penyelesaian 55 % tindak pidana kewilayahan secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.
- b. Penegakan Hukum yang Berkualitas, dengan sasaran :
  - Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas dibanding tahun sebelumnya;
  - Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sebanyak 400 kegiatan.

## **2. PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN**

### **KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM**

Arah Kebijakan Pemerintah terkait dengan Program Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, khususnya untuk Kepastian dan Penegakan Hukum, mencakup 3 (tiga) Program Prioritas yaitu :

**1. Penegakan Hukum yang berkualitas** dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas yaitu :

- 1) Transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara di lembaga peradilan.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan keadilan restoratif.
- 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia aparat penegak hukum.
- 4) Budaya Hukum.
- 5) Sistem Peradilan Perdata yang Mudah dan Cepat.
- 6) Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang efektif** dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas yaitu :

- 1) Penguatan kelembagaan anti korupsi.
- 2) Pencegahan tindak pidana korupsi.
- 3) Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang anti korupsi.

**3. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan** dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas yaitu :

- 1) Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat.
- 2) Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 3) Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
- 4) Penegakan HAM dalam rangka penanganan pengaduan pelanggaran HAM.
- 5) Pendidikan HAM bagi Aparat Penegak Hukum.
- 6) Harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait HAM.

**INDIKATOR DAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS**

Program Prioritas Kepastian dan Penegakan Hukum, untuk Kejaksaan RI dilaksanakan dengan indikator dan sasaran program sebagai berikut:

No.	Indikator	Sasaran
<b>I.</b>	<b>Program Prioritas Penegakan Hukum yang Berkualitas</b>	
	1. Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Perkara	<i>Pilot Project</i> Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI) di 5 (lima) Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan).
	2. Sistem Peradilan Pidana Anak Berlandaskan Keadilan Restoratif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi upaya diversifikasi bagi Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada tiap tahapan penanganan perkara.</li> <li>- SDM Aparat Penegak Hukum (Apgakum) yang kompeten dalam penanganan ABH.</li> <li>- Sarana dan Prasarana yang memadai untuk implementasi keadilan restorasi bagi ABH.</li> </ul>
	3. Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi peran pengawasan dan pemanfaatan hasil pengawasan internal dan eksternal.</li> <li>- Pelaksanaan Diklat terpadu penanganan perkara bagi Apgakum.</li> <li>- Perubahan pola manajemen Apgakum.</li> </ul>
	4. Budaya Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Penyuluhan Hukum yang lebih efektif.</li> <li>- Pendidikan dan Pelatihan pemahaman konstitusional bagi warga negara.</li> </ul>
	5. Sistem Peradilan Perdata yang Mudah dan Cepat	Optimalisasi pelaksanaan mediasi dan <i>small claim court</i> .
	6. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang.

<b>II Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif</b>		
	1. Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi.	Optimalisasi fungsi Koordinasi dan Supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi antar Appakum.
	2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.	Pembangunan Integritas pada Kementerian, Lembaga, Organisasi dan Pemerintah Daerah (KLOP), Mitra Pendidikan, Partai Politik, Komunitas dan Swasta, serta Jaringan Masyarakat Anti Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN) dan Kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di Kejati dan Kejari.
	3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Anti Korupsi.	Penyelesaian RUU terkait Tindak Pidana Korupsi.
<b>III Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan</b>		
	1. Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat.	- Optimalisasi penyaluran dana bantuan hukum kepada masyarakat miskin pencari keadilan. - Optimalisasi layanan peradilan bagi masyarakat miskin pencari keadilan.
	2. Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak.	- Pelaksanaan Penanganan Terpadu Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dan Anak. - Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk SPPT-PKKTP.
	3. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat masa lalu.	Tindak lanjut upaya adjudikasi dan non adjudikasi terhadap pelanggaran HAM Berat.
	4. Penegakan HAM.	Optimalisasi Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM.
	5. Pendidikan HAM bagi Aparat penegak Hukum	Pelaksanaan Diklat HAM bagi Appakum yang mendukung pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang berperspektif HAM.
	6. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait HAM.	Pembenahan Peraturan Perundang-undangan yang tidak berperspektif HAM.

Proyek percontohan (*pilot project*) Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) akan dilaksanakan di lima Provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Penentuan Provinsi ini berdasarkan kesiapan dari Satuan Kerja Aparat Penegak Hukum terkait dalam membangun SPPT-TI diantara empat komponen Apgakum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Proyek percontohan ini diharapkan akan menjadi cikal bakal untuk kebutuhan integrasi penanganan perkara (khususnya perkara pidana umum). Selain kebutuhan sarana prasarana yang mendukung upaya integrasi SPPT-TI, pengembangan SDM pendukung juga diperkuat, sehingga operasional sistem juga dapat dilaksanakan secara maksimal.

Upaya koordinasi dan sinergi lima sektor penyelesaian peraturan perundang-undangan turunan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), penyediaan SDM Apgakum dan SDM non Apgakum (PK Bapas dan Pekerja Sosial/Peksos) serta penyediaan sarana prasarana dalam rangka implementasi UU SPPA, akan difokuskan pada daerah-daerah dengan angka ABH tinggi.

Adapun Kegiatan Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 adalah :

**1. Kegiatan Prioritas : Penegakan Disiplin Aparat pemerintah dan Penegak Hukum**

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan dan pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan,	Pegawai Kejaksaan yang profesional, jujur, disiplin,	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan nilai-nilai	

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
		Kejati, Kejari dan Cabjari	kerja keras, kompeten dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat	esensial Revolusi Mental Kejaksaan RI.	
2	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	SDM Teknis Fungsional Kejaksaan yang berkualitas, profesional, jujur, disiplin, kerja keras, kompeten dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat	Jumlah angkatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional sesuai nilai-nilai esensial revolusi mental.	

## 2. Kegiatan Prioritas : Penegakan Hukum yang Berkualitas

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat,	Tersedianya basis data perkara dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat, akuntabel	Pengelolaan Data Statistik Kriminal Cepat dan Akuntabel serta dapat diakses masyarakat.	1

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
		akuntabel dan mudah diakses masyarakat	dan mudah diakses masyarakat		
2.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan perkara Tindak Pidana Korupsi.	Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Agung.	Penyelesaian Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tipikor, Pelanggaran HAM yang berat dan Tindak Pidana Khusus lainnya (TPPU) secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya yang diselesaikan secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	3
3.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan perkara Tindak Pidana Korupsi.	Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Agung.	Penyelesaian Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tipikor, Pelanggaran HAM yang berat dan Tindak Pidana Khusus	Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kategori A yang diselesaikan secara profesional, teliti, cepat,	40

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
			lainnya (TPPU) secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	tepat dan akuntabel.	
4.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan perkara Tindak Pidana Korupsi.	Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Agung.	Penyelesaian Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tipikor, Pelanggaran HAM yang berat dan Tindak Pidana Khusus lainnya (TPPU) secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kategori B yang diselesaikan secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	55
5.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan	Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Agung.	Penyelesaian Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tipikor, Pelanggaran HAM yang berat dan	Jumlah Penyidikan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat yang diselesaikan secara profesional, teliti, cepat,	2



No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
	perkara Tindak Pidana Korupsi.		Tindak Pidana Khusus lainnya (TPPU) secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	tepat dan akuntabel.	
6.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan perkara Tindak Pidana Korupsi.	Penganganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkat nya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	217
7.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang	Penganganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkat nya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi yang	Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari secara profesional,	1.457

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
	berat dan perkara Tindak Pidana Korupsi.		dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	
8.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan perkara Tindak Pidana Korupsi	Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM yang berat secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah Perkara Pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	2
9.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan perkara Tindak Pidana	Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM yang berat secara profesional,	Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan secara	1

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
	Korupsi		teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	
10.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan perkara Tindak Pidana Korupsi	Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM yang berat secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	80
11.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejati, Kejari dan cabjari	Penanganan Perkara Pidana Umum secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari satu kota dengan Pengadilan secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	118.244
12.	Program Penanganan dan	Penanganan Perkara Pidana Umum	Penanganan Perkara Pidana	Jumlah Perkara Tindak Pidana	13.591

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
	Penyelesaian Perkara Pidana Umum	di Kejati, Kejari dan cabjari	Umum secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	Umum yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari yang tidak satu kota dengan Pengadilan secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	
13.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum	Penanganan Perkara Pidana Umum secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah perkara tindak pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	38
14.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum	Penanganan Perkara Pidana Umum secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah perkara tindak pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam tahap	38

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
				Pra Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	
15.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda	Penanganan Perkara Pidana Umum secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah perkara tindak pidana terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	55
16.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda	Penanganan Perkara Pidana Umum secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah perkara tindak pidana terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, tepat dan	55

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
				akuntabel.	
17.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya	Penanganan Perkara Pidana Umum secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya termasuk penanganan perkara kehutanan di tingkat penyidikan secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	50
18	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya	Penanganan Perkara Pidana Umum secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	570
19.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya	Penanganan Perkara Pidana Umum secara profesional,	Jumlah Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan	570

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
			teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	dalam tahap Pra Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	
20.	Program pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di Daerah, baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan Jaringan Pengawasan di daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan semua unsur Kejaksaan, Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap Penyalahgunaan wewenang, Tugas-tugas Rutin, Pelanggaran Disiplin dan Penanganan Perkara oleh Aparatur Kejaksaan di Daerah secara profesional, teliti, cepat, dan tepat	824
21.	Program pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di wilayah I, II,	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	350

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
	kejaksaan RI	II, IV dan V.	dan Pembangu- nan semua unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	dan diselesaikan terhadap Penyalahguna an wewenang pada wilayah I, II, II, IV dan V secara profesional, teliti, cepat, dan tepat	
22.	Program Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan Permasa Lahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSB UD Hukum Dan Hankam	Penanganan Penyelidikan/ Penga manan/Pengg alangan di Kejati, Kejari dan Cabjari secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	Penyelesaian Penanganan Penyelidikan /Penga manan/Peng galangan di Kejati, Kejari dan Cabjari secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel	Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan/ Penga manan/Pengg alangan di Kejati, Kejari dan Cabjari secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	1.304
23.	Program Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan Permasa Lahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSB	Penerangan dan Penyuluhan tentang Kesadaran Tertib Hukum	Masyarakat berperan dalam mencegah KKN	Jumlah kegiatan pelaksanaan penguatan jaringan masyarakat anti KKN	433



No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
	UD Hukum Dan Hankam				
24.	Program Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan Permasa Lahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSB UD Hukum Dan Hankam	Penerangan dan Penyuluhan tentang Kesadaran Tertib Hukum	Terselenggara ranya penyuluhan/ penerangan hukum dan hubungan masyarakat tentang kesadaran tertib hukum yang berkualitas	Jumlah kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana secara preventif	512

**3. Kegiatan Prioritas : Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi**

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
1	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel	Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kategori A yang diselesaikan	40

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
2	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel	Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kategori B yang diselesaikan	55
3	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah	Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari	1.457
4.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat	Peningkatan Pra Penuntutan dan Penutupan di Kejaksaan Agung	Peningkatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana	Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan	80

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
	dan Perkara Tindak Pidana Korupsi		Korupsi dan Pelanggaran HAM yang berat secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel.	dan Penuntutan	

**4. Kegiatan Prioritas : Budaya Hukum**

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
1.	Program Penyelidikan/Pengamanan /Penggalian Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBU D Hukum Dan Hankam	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat	Laporan Kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana secara preventif	512

**5. Kegiatan Prioritas : Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum**

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari	SDM Apgakum yang kompeten, berintegritas dan profesional melalui perubahan pola rekrutmen, mutasi dan promosi, <i>reward and punishment</i>	Pola mutasi dan promosi yang didasarkan merit system	
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari	SDM Apgakum yang kompeten, berintegritas dan profesional melalui perubahan pola rekrutmen, mutasi dan promosi, <i>reward and punishment</i>	Rekrutmen SDM bekerjasama dngan pihak ketiga	
3.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	SDM Apgakum yang kompeten,	Pemberian <i>reward and punishment</i> berdasarkan	

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
	Tugas Teknis Lainnya	di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari	berintegritas dan profesional melalui perubahan pola rekrutmen, mutasi dan promosi, <i>reward and punishment</i>	monev kinerja	
4.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	Meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin jaksa terkait dengan penanganan perkara	<i>Pilot Project</i> Diklat Terpadu Penanganan Perkara di 3 Provinsi	
5.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari serta jajaran Pengawasan di daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan semua unsur Kejaksaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi terhadap penyalahgunaan wewenang tugas rutin, pelanggaran	824

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
			oleh Jaksa Agung.	disiplin, dan penanganan perkara oleh aparaturnya di Kejaksaan di daerah	
6.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di wilayah I	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan semua unsur Kejaksaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi terhadap penyalahgunaan wewenang di wilayah I	75
7.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di wilayah I	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan semua unsur Kejaksaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi terhadap penyalahgunaan wewenang di wilayah I	350

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
			ditetapkan oleh Jaksa Agung.		
8.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di wilayah II	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan semua unsur Kejaksaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi terhadap penyalahgunaan wewenang di wilayah II	75
9.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di wilayah II	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan semua unsur Kejaksaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi terhadap penyalahgunaan wewenang di wilayah II	350

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
10	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di wilayah III	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan semua unsur Kejaksaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi terhadap penyalahgunaan wewenang di wilayah III	350
11	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di wilayah III	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan semua unsur Kejaksaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi terhadap penyalahgunaan wewenang di wilayah III	75
12	Program Pengawasan dan	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan	Jumlah laporan pengaduan	350



No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
	Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	Tugas Pokok dan Wewenang di wilayah IV	atas Pelaksanaan semua unsur Kejaksaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi terhadap penyalahgunaan wewenang di wilayah IV	
13	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di wilayah IV	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan semua unsur Kejaksaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi terhadap penyalahgunaan wewenang di wilayah IV	75
14	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di wilayah V	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan semua unsur	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	75

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
	Kejaksaan RI		Kejaksaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	dan diselesaikan melalui inspeksi terhadap penyalahgunaan wewenang di wilayah V	
15	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di wilayah V	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan semua unsur Kejaksaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi terhadap penyalahgunaan wewenang di wilayah V	350

**6. Kegiatan Prioritas : Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif**

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	Terselenggaranya proses Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	Meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin Jaksa terkait dengan penanganan perkara ABH	28 Angkatan Diklat Teknis Fungsional (TBC)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Pembangunan /Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan di Daerah	Gedung/Bangunan yang mendukung sarana dan prasarana dalam penanganan ABH	77.360 sarana dan prasarana di seluruh Satker Kejaksaan di Pusat maupun di Daerah

**7. Kegiatan Prioritas : Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan**

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
1.	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis	Perencanaan, Pengembangan Manajemen,	Terlaksananya kegiatan dalam penyiapan	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional	

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
	Lainnya Kejaksaan RI	Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Data serta Permantauan dan Evaluasi	Perencanaan, Pengembang an Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana di lingkungan Kejaksaan serta Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja dan Penyediaan Data Inventarisasi Pembanguna n di seluruh Satuan Kerja	penangan perkara pidana	
2.	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Sistem dan Layanan Informasi dan Komunikasi Penanganan Perkara	Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan	Implementasi <i>Pilot Project</i> SPPT di 5 Provinsi dan Bimtek Pengembang an SPPT berbasis IT	10 Satuanh Kerja (5 Kejati dan 5 Kejari)

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
			akuntabel serta dapat diakses masyarakat		
3.	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Sistem dan Layanan Informasi dan Komunikasi Penanganan Perkara	Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses masyarakat	Pengelolaan Data Statistik Kriminal berdasarkan jenis penanganan perkara dan pengembangan teknologi sistem informasi	Seluruh Satuan Kerja

**8. Kegiatan Prioritas : Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
1.	Program Penanganan dan Penyelesaian	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejati,	Terselesaikannya penanganan perkara	Jumlah penanganan kasus kekerasan	

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
	Perkara Pidana Umum	Kejari dan Cabjari	pidana umum secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel	terhadap perempuan di daerah yang diselesaikan pada tingkat penuntutan yang diproses ke tingkat pengadilan setempat	
2.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya	Terselesaikannya penanganan perkara pidana umum secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel	Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di daerah yang diselesaikan pada tingkat penuntutan yang dilakukan secara terpadu antar Penegak Hukum	570 perkara
3.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya	Terselesaikannya penanganan perkara pidana umum secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel	Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di daerah yang diselesaikan pada tingkat pra penuntutan yang	570 perkara

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
				dilakukan secara terpadu antar Penegak Hukum	
4.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Pembangunan /Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Terselesaikannya penanganan perkara pidana umum secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel	Penyediaan sarana prasarana dan penuntut umum yang responsif penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	

**9. Kegiatan Prioritas : Pendidikan HAM bagi Apgakum**

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	Meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin Jaksa	Jumlah angkatan diklat teknis fungsional terkait dengan diklat HAM	28 angkatan diklat teknis fungsional

Dengan demikian, ada 9 (sembilan) kegiatan prioritas Kejaksaan yang menjadi Program Prioritas Nasional, yang harus dilaksanakan pada tahun 2017.

**BAB III**  
**ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2017**

**A. TEMA PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2017**

Mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yaitu “**MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH**”, maka perlu dipahami terlebih dahulu bahwa tema yang ditentukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 tersebut mempunyai maksud agar dapat menjaga kesinambungan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 yang bertemakan *Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas*. Fokus Pemerintah di tahun 2017 masih pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah.

Apabila diperhatikan, tema ini sepertinya tidak menyentuh pada aspek penegakan hukum, namun demikian pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan dengan sukses, apabila negara dalam keadaan tidak aman, oleh karena itu diperlukan pula adanya kondisi negara yang aman dari gangguan kriminalitas, menurunnya angka tindak pidana korupsi, tercapainya dengan optimal pengembalian kerugian negara serta adanya jaminan kepastian hukum terhadap semua jenis pelanggaran hukum di Indonesia.

Dengan adanya kepastian hukum yang kondusif di Indonesia, akan meningkatkan kepercayaan para pelaku bisnis baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat meningkatkan investasi di berbagai sektor perekonomian di Indonesia, sehingga otomatis akan membuka lapangan



kerja dan dapat menyerap banyak tenaga kerja, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi kemiskinan.

Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur ini pun, diperlukan peran serta dari masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk mengawal pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, disamping itu perlu juga adanya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap jalannya pembangunan itu sendiri, sehingga jangan sampai terjadi gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2017 disusun dengan tema **“MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR KEJAKSAAN RI SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA MEMBANGUN KEJAKSAAN YANG MODERN, BERMARTABAT DAN DAPAT DIPERCAYA“**

Tema ini sejalan dengan Visi Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 yaitu **“ MENJADI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG PROFESIONAL, PROPORSIONAL DAN AKUNTABEL”**.

Tema dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 tersebut mengandung makna bahwa :

- a. Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga Penegak Hukum di Indonesia mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana : melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu

dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik, di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah serta di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, melakukan upaya antara lain :

- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- Pengawasan peredaran barang cetakan;
- Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

**b. Profesional** : segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA, kompetensi, kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas, ketrampilan yang memadai dan berpegang teguh pada peraturan serta kode etik profesi yang berlaku.

**c. Proporsional** : dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejaksaan menggunakan semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.

**d. Akuntabel** : kinerja aparatur Kejaksaan RI memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengambil tema tersebut diatas, diharapkan pada tahun 2017, aparat Kejaksaan RI dapat meningkatkan profesionalitasnya, dan menghasilkan kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan

kepada publik, melalui keterbukaan informasi terhadap kinerja aparat Kejaksaan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan semakin meningkat.

#### **B. SASARAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2017**

Dalam rangka mencapai Visi Kejaksaan diatas, maka telah ditetapkan Misi Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam Program Pencegahan Tindak Pidana ;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam penanganan Perkara Tindak Pidana ;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah Perdata dan Tata Usaha Negara ;
4. Mewujudkan upaya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan RI telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode 2015-2019 yaitu :

1. Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan negara ;
2. Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan ;
3. Meningkatnya kewibawaan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa Hukum Perdata dan tata Usaha Negara ;
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI ;
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kejaksaan RI.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran Strategis Kejaksaan RI untuk periode 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata ;
2. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum ;
3. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara ;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum.
5. Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.

Berdasarkan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2015-2019 tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2017 yaitu :

1. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Kejaksaan yang jujur, disiplin, kerja keras, kompeten dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat , melalui perubahan pola rekrutmen, mutasi dan promosi, *reward and punishment*;
2. Tersedianya basis data perkara dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat, akuntabel dan mudah diakses masyarakat ;
3. Meningkatnya kemampuan proporsional, integritas kepribadian dan disiplin jaksa terkait dengan penanganan perkara

4. Penyelesaian Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tipikor, Pelanggaran HAM yang berat dan Tindak Pidana Khusus lainnya (TPPU) secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel ;
5. Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan semua unsur Kejaksaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

### **C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2017**

Arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang mempunyai visi :”Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Sedangkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan R.I adalah serangkaian upaya dari Kejaksaan R.I untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penentuan arah kebijakan dan stategi ini, Kejaksaan R.I mempedomani arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan prioritas dalam pelaksanaannya, yaitu tentunya tetap mengacu pada arah kebijakan Pemerintah melalui 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Dari 9 (sembilan) agenda prioritas tersebut di atas, maka yang terkait dengan bidang Hukum dan Aparatur adalah agenda kedua yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta agenda keempat yaitu Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Agenda Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya, dengan pencapaian sasaran pokok berupa :

**a. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Salah satu sasaran pokok dari misi ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan : terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain : penyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pemantapan implementasi SAKIP pada instansi pusat dan daerah, pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah secara transparan yang terintegritas, kredibel dan dapat diakses oleh publik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
2. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka partisipasif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik, penyediaan ruang partisipasi bagi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik, penguatan badan publik agar terbuka dan akuntabel melalui pelaksanaan edukasi dan advokasi bagi Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, dan pendampingan operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik daerah.
3. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain penguatan kebijakan *e-government*, harmonisasi kelembagaan *e-government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM, penetapan *quick wins* penerapan *e-government*, dan pengendalian dan pengembangan sistem dan pengadaan infrastruktur *e-government* oleh K/L/Pemda.

**b. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)**

Sasaran pokok dari penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi nasional (RBN) adalah meningkatnya kualitasnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan : terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatkan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi, diimplementasikannya Undang-undang Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi : penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS), penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal, serta penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
2. Penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain : penguatan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional, penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan Reformasi Birokrasi nasional, penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara, perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah, dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain : moratorium penerimaan CPNS selama 5 tahun ke depan, pengendalian jumlah dan redistribusi pegawai, penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan,



kompetitif, berbasis merit dan ICT, penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat, penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya KASN, penerapan sistem manajemen kinerja pegawai, dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain : penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta, peningkatan pelayanan publik yang lebih terpadu, memastikan implementasi kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik, penetapan *quick wins* pelayanan publik K/L/Pemda dan nasional, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan, pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik melalui *citizen charter*, serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat.

**c. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik**

Sasaran pokok yang akan dicapai adalah meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan strategi :

- (a). Penataan regulasi yang mengatur kewajiban instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan,
  - (b). Pengelolaan dan pelayanan informasi dan secara berkualitas melalui berbagai media center, media komunitas dan media tradisional,
  - (c). Pembentukan PPID di setiap badan publik, terutama di daerah dan lembaga non pemerintah yang operasional yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksanaannya,
  - (d). Penyediaan dan pelembagaan forum konsultasi publik dan ruang partisipasi lainnya untuk masyarakat sipil oleh seluruh badan publik,
  - (f). Penyediaan informasi yang terkait dengan rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan,
  - (g). Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
2. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik, dan memanfaatkannya, dengan strategi sebagai berikut :
- (a). Penguatan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan,
  - (b). Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya,

- (c). Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat,
  - (d). Penguatan *government publik relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas penyiaran melalui strategi :
- (a). Revisi terhadap Undang-Undang tentang penyiaran,
  - (b). Pembentukan pemeringkatan untuk menilai kualitas penyiaran publik,
  - (c). Pengaturan pembatasan kepemilikan media penyiaran,
  - (d). Pengaturan konten penyiaran,
  - (e). Penguatan peran Komisi Penyiaran Indonesia.

Agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, dengan pencapaian sasaran pokok berupa :

- 1. Peningkatan Penegakan Hukum yang berkeadilan,** Sasaran pembangunan dibidang hukum diwujudkan dalam :
- a. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum Pidana dan Perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.
  - b. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

Dari dua sasaran pembangunan dibidang hukum tersebut arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah:

- a. Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Untuk melaksanakan arah kebijakan ini dilakukan melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang mendukung penegakan hukum berbagai bidang, mendorong adanya koordinasi antara instansi penegak hukum serta memberikan prioritas dalam rangka penanganan terhadap tindak pidana tersebut. Reformasi lembaga peradilan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada sehingga sejalan dengan upaya reformasi di lingkungan lembaga peradilan. Disamping itu, dalam mendukung upaya reformasi lembaga peradilan perlu adanya komitmen yang kuat untuk memberantas mafia peradilan. Langkah penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku perlu mendapatkan perhatian yang serius dan hukuman yang lebih berat.
- b. Meningkatkan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana, yang dilakukan melalui keterpaduan substansi hukum acara pidana baik KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sinkronisasi kelembagaan antar lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk mengurangi tumpang tindih hingga konflik dalam pelaksanaan kewenangan antar penegak hukum melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi, pendidikan bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi disparitas pemahaman aparat penegak hukum dalam pemberlakuan dan penerapan hukum, pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan dan akuntabel sehingga mendorong adanya efisiensi dan transparansi dengan didukung oleh sistem pengawasan internal dan eksternal sehingga dapat mencegah

terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum , serta penguatan kapasitas Lembaga Masyarakat dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan.

- c. Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum berlandaskan prinsip *restorative justice* yang merupakan hal baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana anak berbasis prinsip *restorative justice* yang memerlukan strategi peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga , peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan *stakeholders*, penyusunan peraturan pelaksanaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan *restorative justice*.
- d. Melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat, merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri, serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu diperlukan strategi secara sistematis terhadap revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan Haki, pembentukan penyelesaian sengketa secara cepat (*small claim court*), dan peningkatan utilitas lembaga mediasi.
- e. Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat penegak hukum sebagai penentu utama keberhasilan

pembangunan hukum secara terpadu. Khususnya untuk mengatasi permasalahan korupsi yudisial melalui strategi peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen aparat penegak hukum.

- f. Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM, Indonesia telah meratifikasi konvensi HAM Internasional dan menyusun Parameter HAM. Namun, dari berbagai instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat beberapa instrumen internasional yang belum dilaksanakan. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip HAM dan kesetaraan gender.
- g. Penanganan pengaduan HAM, dilatarbelakangi oleh kondisi pengaduan HAM yang belum cukup membaik jika dilihat dari trend pengaduan pelanggaran HAM yang tidak banyak berkurang dari tahun ke tahun. Pengaduan pelanggaran HAM yang paling banyak diajukan khususnya terkait dengan hak memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan. Bahkan, pihak yang paling banyak diadukan sebagai pelanggar HAM adalah aparat penegak hukum, yakni Kepolisian. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM, dan optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM.
- h. Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu, memerlukan konsensus nasional dari semua pemangku kepentingan. Hal tersebut merupakan suatu langkah awal penting untuk dapat menarik garis tegas bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan praktek dan pengalaman kekerasan yang masif di masa lalu. Konsensus bersama dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran baru dalam masyarakat bahwa pelanggaran HAM tidak dapat

dibiarkan dan terulang kembali di masa yang akan datang. Dengan memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu, maka implementasi perintah putusan Mahkamah Konstitusi untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk menangani pelanggaran hak asasi di masa lampau, maupun realisasi mandat TAP No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menjadi wadah yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan dilakukan melalui pembentukan suatu komisi yang bersifat ad hoc/temporer, dengan tugas memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu yang berada berlangsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden. Proses pengungkapan pelanggaran HAM dilakukan melalui serangkaian kegiatan baik pengumpulan informasi langsung maupun dokumen untuk menyusun suatu laporan yang komprehensif mengenai berbagai kekerasan dan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

- i. Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat, dilatarbelakangi oleh adanya komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan berbagai kebijakan terkait layanan peradilan. Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak berjalan optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi sosialisasi, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan.

- j. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dilatarbelakangi oleh adanya komitmen pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan baik dalam konstitusi maupun berbagai konvensi internasional yang diratifikasi. Namun, kondisi faktual justru menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh belum optimalnya peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap seksual terhadap perempuan. Oleh karena itu, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Demikian juga penanganan anak sebagai korban maupun saksi dalam kasus kekerasan perlu untuk mendapatkan perhatian. Data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak sering kali terjadi dari orang-orang terdekat baik yang berasal dari keluarganya sendiri maupun dari lingkungan sekolahnya. Dalam rangka penanganan kasus kekerasan dimana anak sebagai korban atau saksi perlu adanya perlakuan khusus baik dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut maupun perlu adanya fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat mengurangi pra dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak tersebut. Melalui upaya peningkatan kemampuan dan pemahaman dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak sebagai korban atau saksi akan dapat meminimalisir dampak negatif yang akan mempengaruhi kejiwaan anak tersebut. Disamping itu dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak akan sangat berperan terhadap keberhasilan dalam penanganan kasus tersebut.



- k. Meningkatkan pendidikan HAM, dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara masih belum memiliki pemahaman HAM yang memadai sehingga hal ini berdampak pada masih banyaknya kasus pelanggaran HAM. Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang HAM, diperlukan pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum dan penyelenggaraan negara melalui strategi pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian.
- l. Membangun budaya hukum, dalam masa transparansi dimana sumber informasi terbuka sangat luas dan era dimana masyarakat diberikan ruang luas untuk menyampaikan pendapatnya, maka peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan hukum sebagai bagian dari budaya masyarakat diharapkan masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Disamping itu masyarakat dapat ikut berperan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Informasi dari masyarakat akan sangat membantu bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Namun demikian kualitas laporan masyarakat akan sangat mempengaruhi tingkat kegunaan laporan tersebut. Melalui upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum diharapkan akan dapat menumbuhkan budaya hukum yang baik. Masyarakat tidak hanya ikut berperan dalam mengurangi adanya pelanggaran hukum akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan penegakan hukum.

## **2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

Sasaran pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

- a. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Korupsi, upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan *United Nations Convention Against Corruption* yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
- b. Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi, keberhasilan pemberantasan korupsi akan sangat tergantung kepada kinerja dari instansi yang mempunyai kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan kualitas penanganan kasus korupsi oleh KPK merupakan salah satu komponen penting. Namun demikian Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari instansi penegak hukum yang juga berwenang menangani tindak pidana korupsi juga perlu mendapatkan perhatian baik dalam hal penguatan sumber daya manusianya maupun dukungan operasional dalam melaksanakan tugas fungsi tersebut. Optimalisasi peran KPK dalam rangka melakukan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi penegak hukum lain akan mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas penegak hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
- c. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti korupsi, pada tataran implementasi kebijakan, diperlukan upaya peningkatan efektivitas implementasi kebijakan anti korupsi melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, pelaksanaan kerjasama luar negeri (*mutual legal assistance*) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- d. Meningkatkan Pencegahan korupsi, pada aspek preventif, diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan

meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti korupsi masyarakat dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, mengefektifkan peran Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) baik di Pusat maupun di daerah.

**3. Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar**

1. Penebangan Liar, dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :
  - a. Peningkatan instrumen penegakan hukum, melalui :
    - Penyusunan Satu Peta Tematik Hutan dengan tingkat akurasi yang memadai di tingkat tapak dan untuk dasar penindakan hukum.
    - Percepatan penyelesaian tata batas dan pengukuhan kawasan hutan, antara lain melaksanakan peraturan bersama Kemenhut, Kemendagri, PU dan BPN tentang Penyelesaian Pengusahaan Tanah di dalam hutan,
    - Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengawas dan penegak hukum (rekrutmen, mutasi, peningkatan kapasitas, promosi).
  - b. Peningkatan efektivitas penegakan hukum, melalui
    - Penyederhanaan prosedur penegakan hukum kasus penebangan liar,
    - Meningkatkan proses yustisi, mencabut ijin pihak yang melakukan perusakan hutan illegal, dan meningkatkan efek jera pelaku illegal,

- Peningkatan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam kawasan hutan,
  - Pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) sesuai Undang-undang No. 18 Tahun 2013.
- c. Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan, melalui :
- Penyelesaian pembangunan KPH untuk seluruh kawasan hutan.
  - Peningkatan ketertiban masyarakat dalam pengamanan hutan melalui kemitraan, termasuk pengembangan hutan adat.
2. Perikanan Liar, dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :
- a. Penguatan lembaga pengawasan laut, melalui :
- Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai suatu lembaga yang mengintegrasikan pengawasan kegiatan di laut, termasuk *illegal fishing* dan pengembangan SOP pengawasan di laut.
  - Penguatan dan integrasi sistem pengawasan berjenjang (Lembaga-Pemda-Masyarakat), Penguatan kelembagaan pengawasan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, desa).
  - Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas laut dan perikanan termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS).
  - Pengembangan sistem penindakan cepat dan terpadu.
- b. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana, melalui :

- Peningkatan peran forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan.
  - Mempercepat proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) antara lain melalui Pengadilan Khusus Perikanan.
  - Mengantisipasi terjadinya tuntutan (Pra-peradilan, *class Action*, dan Tuntutan Perdata).
  - Mengamankan dan merawat barang bukti (misal : kapal, alat tangkap) agar nilai ekonominya dapat dipertahankan.
  - Mempercepat penanganan dan pemulangan (deportasi) ABK asing yang tertangkap di Indonesia dan fasilitas pemulangan ABK Indonesia yang tertangkap di luar negeri.
- c. Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, melalui :
- Optimalisasi pelaksanaan MCS (*Monitoring, Control, Surveillance*) dalam pengelolaan perikanan, dan menyelenggarakan pengawasan di laut dalam satu sistem pengawasan yang terpadu.
  - Meningkatkan dan menambah stasiun pengawas (radar) dan/atau sistem lain, yang terintegrasi dengan VMS (*Vessel Monitoring Sistem*) terutama di titik-titik pintu masuknya kapal-kapal perikanan asing ke Indonesia.
  - Mewajibkan pemasangan *transmitter* VMS bagi kapal berukuran 30 GT ke atas serta menjadikan data VMS sebagai alat bukti dalam penegakan hukum.
  - Peningkatan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah kapal patroli (penjagaan laut dan pantai) serta koordinasi antar negara.
  - Memperkuat sarana dan prasarana/instrumen pengawasan masyarakat (Pokmas), dengan melengkapi sarana dan prasarana pengawasannya.

- d. Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap, melalui (1) pengembangan sistem aplikasi perijinan elektronik secara terpadu, (2) pembenahan perijinan usaha perikanan di pusat dan di daerah dengan memperhitungkan potensi sumber daya ikan, (3) meningkatkan upaya menyesuaikan sistem perijinan yang diterapkan secara internasional.
  - e. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di pelabuhan, perikanan yang dilakukan melalui pemeriksaan terhadap (1) Ketaatan berlabuh di pelabuhan pangkalan sesuai dengan ijin yang diberikan, (2) ketaatan nahkoda kapal perikanan dalam melaporkan hasil tangkapan melalui pengisian *Log Book* Perikanan, dan (3) menerapkan ketentuan pengelolaan penangkapan ikan melalui *Port State Measures* (PSM).
3. Penambangan Liar, dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :
- a. Penyederhanaan proses perijinan, pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan secara transparan melalui :
    - Penyederhanaan, transparansi dan penertiban pemberian ijin pertambangan terutama pertambangan skala kecil.
    - Penyusunan dan pelaksanaan pemberian ijin secara terpadu dari berbagai instansi bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga lain terkait (TNI/Polri).
    - Pembinaan dan pemberian ijin pada kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, dan pada areal pertambangan yang ditinggalkan perusahaan besar.
  - b. Penegakan hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan secara tegas konsekuen dan adil, melalui :
    - Pembentukan badan kerjasama penanggulangan PETI tingkat nasional agar dapat dilakukan pengawasan dan penertiban

PETI secara menyeluruh dengan anggota beberapa instansi dan lembaga yang terkait.

- Pelaksanaan operasi penertiban secara konsisten dan berkesinambungan.
- Penyusunan prosedur penyidikan dan penindakan PETI secara transparan agar pelaksanaan penertiban PETI tidak berlarut-larut.
- Pemberian sanksi yang tegas pada aparat pemerintah yang terlibat dalam kegiatan PETI.

c. Penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan, melalui :

- Penegakan standar pertambangan berkelanjutan (*good mining practices*).
- Pembinaan dan pendampingan pada operasi penambangan skala kecil dan bantuan teknologi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan peningkatan hasil tambang.
- Peningkatan jumlah inspektur tambang di daerah yang pada saat ini masih sangat kurang.
- Penegakan keharusan pengelolaan limbah dan area pasca tambang, termasuk pengelolaan area pembuangan limbah penambangan.

d. Pengembangan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar pertambangan, melalui :

- Pembentukan kemitraan yang difasilitasi oleh pemerintah antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat dengan cara bertahap yaitu penerimaan, pelibatan dan kolaborasi.
- Membentuk koperasi pertambangan untuk melaksanakan legalisasi penambangan skala kecil dengan masyarakat dilibatkan secara aktif melaksanakan operasi dan kegiatannya

sehingga masyarakat tidak mengalami kehilangan mata pencaharian.

- Kerjasama usaha dengan perusahaan pertambangan dalam mengelola kebutuhan perusahaan dengan mempekerjakan masyarakat.

#### **4. Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika**

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba (*demand side*).
2. Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba (*demand side*).
3. Meningkatkan efektivitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*).

Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan di atas adalah :

1. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba di daerah.
2. Diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media.
3. Penguatan lembaga 226 Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2015-2019, terapi dan rehabilitasi.
4. Rehabilitasi pada korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba.
5. Kegiatan Intelijen narkoba.

#### **5. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal**

Sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan anak, perempuan, dan masyarakat marjinal dalam lima tahun kedepan adalah



tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan proses pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal. Dalam mencapai sasaran diatas, arah kebijakan dalam rangka melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal adalah :

- a. Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, melalui:
  - Pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak.
  - Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dan perempuan.
  - Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta keadilan restorasi (*restorative justice*) bagi anak.
  - Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban atau saksi tindak kekerasan.
  - Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui :
  - Penguatan sistem Perundang-Undangan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran.
  - Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal, melalui:
- Peningkatan pemahaman masyarakat marjinal terhadap hak dan mekanisme dalam mendapatkan layanan bantuan hukum.
  - Pelaksanaan sosialisasi dan penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum.
  - Pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum.
  - Optimalisasi pelaksanaan sidang keliling dan pemanfaatan dana prodeo bagi kelompok marjinal termasuk masyarakat miskin.
  - Penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok marjinal, untuk memastikannya mendapat identitas hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Arah Kebijakan dan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2017, dalam rangka mewujudkan Kejaksaan yang kuat dalam penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, adalah :

1. Penegakan hukum yang berkeadilan dengan meningkatkan kualitas penanganan berbagai perkara tindak pidana dan perdata serta tata usaha negara melalui sistem kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel bagi kepentingan para pencari keadilan, dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berintegritas dan profesional.

2. Mewujudkan penghormatan tanpa perbedan, perlindungan atas pemenuhan hak dan keadilan bagi setiap warga negara dengan cara meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum. Bersamaan pula mendukung upaya reformasi birokrasi, membangun komitmen kuat dalam memberantas praktek-praktek mafia peradilan.
3. Mengambil peran dalam penindakan dan pemberantasan tindak pidana penebangan hutan secara liar, pencurian ikan secara liar dan praktek penambangan liar dengan meningkatkan ketegasan sikap dan konsistensi, mengimplementasikan peraturan perundang-undangan secara efektif, berikut segenap instrumen penegakan hukum dengan jalan diantaranya melakukan penyederhanaan prosedur penanganan perkara.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), Kejaksaan ikut menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisial, termasuk operasi tangkap tangan. Untuk itu setiap satuan kerja membuat langkah antisipasi agar pungli tidak terjadi di lingkungan masing-masing, dengan mengingatkan dan tidak memberikan toleransi kepada siapapun yang masih melakukannya.

Sedangkan upaya mewujudkan institusi Kejaksaan yang modern , bermartabat dan dapat dipercaya, bukanlah sebuah persoalan yang mudah. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, antara lain :

**a. Perubahan beberapa Norma Hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi**

Penegakan hukum di Indonesia mengalami dinamika dengan banyaknya perubahan norma hukum dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi antara lain :

1. Putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian saksi dalam KUHAP juga harus dimaknai sebagai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
2. Putusan MK Nomor : 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permintaan Peninjauan Kembali terhadap putusan dapat diajukan lebih dari satu kali.
3. Putusan MK Nomor : 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya memaknai frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagai dua alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP serta memperluas obyek pra peradilan menjadi penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
4. Putusan MK Nomor : 33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, dikarenakan Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding dan kasasi dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup.
5. Putusan MK Nomor : 107/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menghapus batas waktu pengajuan permohonan Grasi.
6. Putusan MK Nomor ; 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” harus dimaknai sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas

permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

7. Putusan MK Nomor : 21/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa “permufakatan jahat” harus dimaknai bila 2 (dua) orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana.

**b. Integritas Aparatur Kejaksaan**

Dalam menjalankan tugas khususnya dalam penanganan perkara, diperlukan agar aparat Kejaksaan khususnya para Jaksa untuk menjaga integritas, dengan sungguh-sungguh, ekstra hati-hati, teliti, profesional dan proporsional, sehingga tidak mencoreng citra institusi dan menjaga kepercayaan masyarakat. Untuk itu fungsi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Penegakan disiplin dan 7 (tujuh) tertib harus senantiasa dilaksanakan dengan kesadaran seluruh pegawai Kejaksaan baik Jaksa maupun Pegawai Tata Usaha.

**c. Penanganan Perkara Penting**

Dalam penanganan perkara-perkara penting, wajib dilakukan upaya pembuktian secara jeli dan cermat, sehingga diperlukan profesionalitas dan kapabilitas Jaksa Penuntut Umum yang akan diuji dihadapan publik, sehingga diperlukan kesiapan, persiapan dan penguasaan materi perkaranya.

Di samping itu juga diperlukan mental dan fisik yang prima bagi seorang Jaksa dalam menyelesaikan persidangan perkara yang panjang, kemampuan untuk meyakinkan Hakim dengan melakukan terobosan-terobosan melalui pengajuan alat-alat bukti,

memhadirkan saksi-saksi dan menyampaikan fakta yang relevan sehingga tidak dapat terbantahkan.

Diperlukan juga sikap seorang Jaksa yang tetap mengedepankan kesopanan, etika terhadap pihak terdakwa dan penasihat hukumnya, saksi-saksi maupun majelis hakim. Jaksa juga dituntut untuk dapat menetralkan opini publik yang berkembang akibat isu tidak benar yang sengaja dilontarkan oleh pihak terdakwa maupun penasihat hukumnya, dengan pernyataan yang proporsional, terkontrol dan terukur sesuai dengan bukti dan fakta dari perkara yang sedang ditanganinya.

**d. Pemberantasan Pungutan Liar**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgar Saber Pungli), dibentuk dengan pertimbangan bahwa praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu disikapi, ditanggulangi dan diberantas secara tegas dan konsisten berkelanjutan agar mampu menghentikan dan menimbulkan efek jera. Satgat Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi, termasuk operasi tangkap tangan.

Kejaksaan merupakan bagian dari Satgas Saber Pungli, sekaligus juga menjadi obyek dari pemantauan tim tersebut, sehingga perlu langkah antisipasi agar pungli tidak terjadi di lingkungan Kejaksaan baik di Pusat maupun di daerah, dengan memningatkan dan tidak memberikan toleransi kepada siapapun yang masih melakukannya.

**e. Reformasi Hukum**

Sesuai dengan Program Kerja Pemerintah dalam Nawacita, maka Presiden melalui Menkopolkam telah menyiapkan cetak biru Reformasi Hukum Nasional sebagai upaya pembangunan hukum nasional dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait termasuk Kejaksaan. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai lembaga yang memegang kewenangan penuntutan perkara pidana, wajib mendukung setiap kebijakan Pemerintah, yang dalam kaitannya dengan Program Reformasi Hukum, meliputi Reformasi Birokrasi, Reformasi Regulasi dan Pembangunan Budaya Hukum.

**D. REKOMENDASI HASIL RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2016**

Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2016, telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan 25 Nopember 2016 di Bogor, dengan tema “ **Membangun Institusi Kejaksaan Modern Menuju Penegakan Hukum Yang Profesional, Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya** “. Tema tersebut mengandung makna :

1. **Modern**, artinya mampu menjalankan tugas secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, diantaranya teknologi informasi, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Di samping itu, dalam rangka mewujudkan *e-government*, pemanfaatan teknologi juga akan mampu mempermudah akses dalam pelayanan masyarakat seperti pelaksanaan *e-tilang*, *e-pengawasan*, *case management system* maupun *website* Kejaksaan RI, sehingga masyarakat dapat mempunyai akses informasi berkenaan dengan proses penanganan perkara oleh Kejaksaan secara mudah, cepat dan akurat. Selain itu keberadaan *website* tersebut juga akan dapat dijadikan sebagai sarana kontrol masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan.

- 2. Profesional**, artinya setiap pelaksanaan tugas selalu berlandaskan kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang oleh pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang cukup, serta dengan tetap berpegang teguh pada aturan dan kode etik profesi.
- 3. Bebas Korupsi**, bermakna bahwa setiap aparatur harus memiliki moral dan integritas yang baik dan teruji serta terpuji sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenang khususnya dalam penegakan hukum akan terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 4. Bermartabat**, berarti dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang ada setiap aparatur harus selalu menjaga etika, sikap, perbuatan dan nama baik institusi, keluarga maupun pribadi.
- 5. Terpercaya**, bahwa setiap aparatur haruslah mampu menjaga amanah yang dibebankan baik kepada dirinya maupun institusinya sekaligus menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, tepat waktu dan tidak mengkhianati pemberi amanah dan amanat yang diembannya.

Adapun Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

**I. BIDANG PEMBINAAN :**

1. Peningkatan kualitas SDM Kejaksaan melalui diklat teknis, fungsional dan teknologi informasi.  
(Penanggung Jawab : Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Badan Diklat dan Kepala Kejaksaan Tinggi).
2. Peningkatan dan penyelenggaraan kompetensi serta sertifikasi aparatur Kejaksaan RI yang menunjang tugas dan fungsi



Kejaksaan (pengelola keuangan, auditor, pustakawan, arsiparis, perencana dan aparatur fungsional lainnya).

(Penanggung Jawab : Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Badan Diklat dan Kepala Kejaksaan Tinggi).

3. Penempatan SDM Kejaksaan sesuai dengan jumlah yang tepat dan beban kerja yang terukur.

(Penanggung Jawab : Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Kejaksaan Tinggi).

4. Peningkatan jumlah jabatan fungsional lainnya (arsiparis, perpustakaan, sandiman dan lain-lain) melalui *inpassing*.

(Penanggung Jawab : Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Puslitbang).

5. Peningkatan SDM Kejaksaan dalam Bidang Pengamanan Pimpinan.

(Penanggung Jawab : Kepala Biro Umum, Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Biro Hukum).

## **II. BIDANG INTELIJEN :**

1. Mendorong percepatan proses perubahan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang saat ini masih dalam proses pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai tindak lanjut hasil Rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2015. Dalam konsep perubahan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Tim Pengawal dan Pengaman

Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4 Pusat) dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4 Daerah) dimasukkan ke dalam Struktur Organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, hal ini sejalan dengan program revitalisasi dan reformasi hukum untuk penguatan TP4 Pusat dan TP4 Daerah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

(Penanggung Jawab : Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen).

2. Memberikan masukan kepada Biro Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan untuk :

- a. Melakukan sinkronisasi substansi UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara ke dalam Konsep Perubahan UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka penegakan hukum.
- b. Mendorong percepatan proses masuknya Rancangan Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI ke dalam Prolegnas.
- c. Memasukkan kewenangan Kejaksaan RI untuk melakukan penyadapan ke dalam Konsep Perubahan UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.

(Penanggung Jawab : Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Direktorat I, Direktorat II, Direktorat III dan Puspenkum).

3. Berperan aktif dalam proses pembahasan Rancangan UU tentang Sistem Perbukuan dan Rancangan UU tentang Kebudayaan.

(Penanggung Jawab : Direktorat II).

4. Berperan aktif dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Barang Cetak, Rancangan Peraturan Presiden

tentang Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM). Dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).

(Penanggung Jawab : Direktorat I dan II).

5. Menyusun Konsep Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat.

(Penanggung Jawab : Direktorat III).

6. Menyusun konsep Peraturan Jaksa Agung tentang perubahan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-011/A/JA/04/2008 tentang Pembentukan Pusat Pemantauan (*Monitoring Center*) Kejaksaan RI, yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, serta konsep Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Daftar Pencarian Orang.

(Penanggung Jawab : Direktorat III).

7. Mempercepat proses penyelesaian Peraturan Jaksa Agung tentang :
  - a. Rekrutmen dan Pembinaan Karier Sumber Daya Manusia Bidang Intelijen Kejaksaan RI ;
  - b. Mekanisme Kerja Bidang Intelijen Kejaksaan RI ;
  - c. Standar Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Bidang Intelijen Kejaksaan RI ;

yang saat ini masih dalam tahap FGD dengan Badan Intelijen Negara, dan selanjutnya dibahas dengan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(Penanggung Jawab : Direktorat III).

8. Menyusun konsep Peraturan Jaksa Agung tentang Tata Kelola Senjata Api di Lingkungan Kejaksaan RI.

(Penanggung Jawab : Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen).

9. Menyelenggarakan Program Penyegaran (*Refreshing Course*) dan/atau *In House Training* bagi *user* (Jaksa Agung Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) dan jajaran bidang intelijen mengenai :

- a. Tugas, wewenang dan fungsi Intelijen Kejaksaan / Intelijen Penegakan Hukum ;
- b. Pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang-bidang lain di lingkungan Kejaksaan RI melalui mekanisme sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-046/A/JA/12/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Terintegrasi Dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ;
- c. Administrasi Intelijen Kejaksaan RI sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan RI ;
- d. Pemanfaatan peralatan-peralatan intelijen dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi bidang intelijen ;
- e. Koordinasi antar penyelenggara intelijen Negara dan para *stakeholder* terkait lainnya.

(Penanggung Jawab : Direktorat I, II dan III).

10. Melakukan sosialisasi Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-014/A/JA/08/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan

Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI serta melakukan evaluasi dan supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi TP4 Pusat dan TP4 Daerah.

(Penanggung Jawab : Direktorat I).

11. Menyelenggarakan Program Penyegaran (*Refreshing Course*) mengenai pelaksanaan kewajiban mempublikasikan kinerja satuan kerja baik di Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan di Daerah, sesuai dengan PER-011/A/JA/09/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Website Kejaksaan RI guna kepastian mendapatkan berita dari seluruh bidang dan satuan kerja daerah.

(Penanggung Jawab : Puspenkum).

12. Memberikan masukan kepada Badan Diklat Kejaksaan RI dalam rangka menyusun Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Intelijen guna pembentukan sumber daya manusia berkarakter intelijen, termasuk pembentukan sumber daya manusia intelijen berspesialisasi khusus di masing-masing bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM.

(Penanggung Jawab : Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen).

13. Melakukan optimalisasi pembuatan produk intelijen di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM, baik kuantitas maupun kualitas, pemanfaatan peralatan intelijen, dan pelaksanaan koordinasi baik dengan penyelenggara intelijen negara maupun para *stakeholder* di daerah serta pelaporannya.

(Penanggung Jawab : Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri).

14. Memberdayakan Tenaga Fungsional Agen (60 orang) yang ditempatkan baik di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri.

(Penanggung Jawab : Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri).

15. Melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dan Badan Diklat Kejaksaan RI serta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan/atau Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) dalam rangka pembentukan dan pemenuhan tenaga Fungsional Agen dan Fungsional Sandiman Kejaksaan RI agar ke depan Kejaksaan RI tidak bergantung pada sumber daya manusia sandi dari Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG).

(Penanggung Jawab : Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan Direktorat III).

16. Menyusun konsep pembangunan Bank Data Intelijen berbasis teknologi informasi *big data* (teknologi informasi *database* terkini), menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam rangka pembangunan Bank Data Intelijen berbasis teknologi informasi *big data*.

(Penanggung Jawab : Direktorat III).

17. Melakukan koordinasi dengan LEMSANEG (Lembaga Sandi Negara) untuk :

- a. Meminta dukungan peralatan, kontra penginderaan terbaru dari LEMSANEG.
- b. Meminta dukungan peralatan pengacak sinyal (*jammer*) bagi Kejaksaan Tinggi yang belum mendapatkan peralatan pengacak sinyal (*jammer*), yakni Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi DKI, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

(Penanggung Jawab : Direktorat III).

18. Melakukan koordinasi intensif dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dalam rangka memberikan masukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan mengenai penempatan pegawai pada Bidang Intelijen baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang disesuaikan dengan karakteristik organisasi intelijen baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

(Penanggung Jawab : Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen).

19. Melakukan koordinasi intensif dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dalam rangka penyusunan RKA-K/L mengenai :

a. Penyediaan anggaran untuk pembaruan/*upgrade* berbagai sistem dan peralatan intelijen yang dikelola oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen termasuk penyediaan anggaran untuk biaya perawatan ;

b. Penyediaan anggaran untuk pengadaan berbagai peralatan berteknologi terkini lainnya yang dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

c. Penyediaan anggaran untuk kegiatan intelijen, operasi intelijen dan biaya koordinasi untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi intelijen penegakan hukum dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang-bidang di lingkungan Kejaksaan RI ; dan

d. Penyediaan anggaran untuk operasional peralatan *tactical passive*.

(Penanggung Jawab : Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen).

#### IV. BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

##### **Rekomendasi Jangka Panjang :**

1. Penanganan perkara pidum sebagai sarana membangun *public trust*, dengan rencana tindakan :  
Membuat surat edaran bahwa penanganan perkara pidum dijadikan sarana membangun *public trust*, yang pada pokoknya berisi :
  - a. Terhadap perkara sederhana dan melibatkan rakyat kecil, Kejaksaan lebih menunjukkan keberpihakan pada keadilan rakyat kecil.
  - b. Terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat, supaya jaksa lebih menunjukkan keseriusannya bahwa Kejaksaan adalah representasi kepentingan publik.
2. Debirokratisasi penanganan perkara dengan menyederhanakan birokrasi penanganan perkara, dengan rencana tindakan membentuk Tim Pengkaji penyederhanaan birokrasi penanganan perkara pidum :
  - a. Administrasi penanganan perkara pidum. Pengendalian penanganan perkara pidum.
  - b. Pengendalian penanganan perkara pidum.

(Penanggung Jawab : JAMPIDUM).

##### **Rekomendasi Jangka Menengah :**

1. Mengintegrasikan birokrasi penanganan perkara secara internal dan eksternal dengan rencana tindakan membuat sistem administrasi perkara *online* di lingkungan Jampidum, Kejati dan Kejari terkoneksi dengan administrasi perkara aparat penegak hukum lain.
2. Penyusunan anggaran penanganan perkara pidum dengan mempertimbangkan keragaman jenis kegiatan dan faktor geografis, dengan rencana tindakan membentuk tim untuk membuat analisis



kebutuhan riil anggaran penanganan perkara dengan memperhatikan :

- a. Faktor geografis.
- b. Faktor kompleksitas perkara.
- c. Faktor resiko untuk dijadikan bahan bagi Biro Perencanaan dalam menyusun anggaran penanganan perkara pidum.

(Penanggung Jawab : JAMPIDUM).

**Rekomendasi Jangka Pendek :**

1. Aspek Teknis Hukum :

- (1). Penanganan perkara yang memenuhi akuntabilitas hukum baik formil dan materiil, dengan rencana tindakan :

Peningkatan *capacity building* dengan :

- a. Secara berkesinambungan mengadakan *inhouse training*.
- b. Mengirimkan jaksa pidum dalam kegiatan ilmiah di dalam dan luar negeri.

- (2). Reorientasi penanganan perkara yang menitikberatkan pada *substansial justice* tanpa mengesampingkan *procedural justice*, dengan rencana tindakan , membuat surat edaran tentang pedoman penanganan perkara agar :

- a. JPU sensitif dalam penanganan perkara yang menyentuh rasa keadilan publik khususnya masyarakat tingkat bawah.
- b. mengedepankan aspek *restoratif justice* dan tidak menjadikan pidana sebagai satu-satunya penyelesaian masalah.

- (3). Revitalisasi Pedoman Teknis PenangananPerkara yang terintegrasi dan *up to date* sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat, dengan rencana tindakan :

Membentuk Tim untuk melakukan revitalisasi pedoman teknis penanganan perkara pidum :

- a. Pedoman teknis karena peraturannya sudah berubah atau tidak berlaku sehingga tidak relevan.
- b. Pedoman teknis karena adanya putusan MK.

c. Pedoman teknis karena perkembangan hukum internasional dll.

2. Aspek Sosiologis :

- (1). Penanganan perkara harus memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat.
- (2). Penanganan perkara menghindari terkesan tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
- (3). Penanganan perkara harus memperhatikan nilai-nilai kerifan lokal.

Dengan renacan tindakan :

Membuat surat edaran tentang pedoman teknis penanganan perkara pidana yang memperhatikan aspek sosiologis :

- a. Sensitivitas daerah.
- b. Kearifan lokal.
- c. Kekhususan daerah.

3. Aspek Inovasi Hukum :

- (1). Memaksimalkan pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan rencana tindakan :  
Membuat Petunjuk Teknis Peraturan Jaksa Agung PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subyek Hukum Korporasi.
- (2). Pendekatan *multidoor* terhadap perkara tindak pidana umum, dengan rencana tindakan membuat petunjuk teknis Jampidum untuk penanganan perkara tindak pidana umum dengan pendekatan *multidoor*.

**IV. BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS :**

- a. Terwujudnya unit organisasi kendali mutu (*quality control*) di jajaran bidang tindak pidana khusus, dengan penanggung jawab :  
Sesjampidsus.

- b. Terlaksanakannya *in house training* dalam rangka peningkatan kemampuan Penyelidik/Penyidik, Penuntut Umum dan Jaksa Eksekutor, antara lain terkait tata cara penyelesaian tunggakan uang pengganti dan denda, *surveillance, asset tracing, digital forensic*, dengan penanggung jawab : Para Direktur dan Kajati.
- c. Tersusunnya tata cara pemberian status dan penyelesaian "*justice collaborator*" terhadap pelaku tindak pidana khusus dalam rangka mendukung pengungkapan perkara tindak pidana korupsi, dengan penanggung jawab : Direktur Penyidikan dan Direktur Penuntutan.
- d. Tersusunnya Petunjuk Teknis Tata Cara Penetapan dan Penyelesaian Perkara yang tersangka, terdakwa dan terpidana berstatus DPO, dengan penanggung jawab : Para Direktur pada Jampidsus).
- e. Tersusunnya Petunjuk Teknis tentang Tindak Lanjut terhadap Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka dan/atau Tidak Sahnya Penyidikan, dengan penanggung jawab : Direktur Penyidikan).
- f. Tersusunnya surat Jampidsus tentang Penyelesaian Tunggakan Perkara Tindak Pidana Khusus dalam Program Zero Tunggakan dan sisa penanganan perkara tindak pidana khusus tahun 2016 diselesaikan pada Maret 2017, dengan penanggung jawab : Para Direktur pada Jampidsus.

**V. BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA :**

- a. Peningkatan kompetensi teknis Jaksa Pengacara Negara melalui :
  - 1. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) dan *In House Training* (IHT) dalam permasalahan tertentu dapat bekerjasama dengan Pengguna Jasa JPN ;
  - 2. Mendorong dan mengusulkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI untuk mempropagandakan Diklat dalam rangka peningkatan kompetensi JPN ;

3. Menugaskan JPN untuk mengikuti pendidikan dan atau pelatihan bersertifikasi dalam rangka spesialisasi JPN.

Penanggung Jawab : Jamdatun dan Kajati.

b. Mendorong pembangunan sarana Teknologi & Informasi yang memadai sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penanggung Jawab : Jamdatun.

c. Merancang mekanisme uji kualitas (*quality control*) untuk semua produk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penanggung Jawab : Jamdatun.

d. Mengoptimalkan publikasi, eksistensi dan prestasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penanggung Jawab : Jamdatun, Kajati dan Kajari.

e. Mendorong tersedianya anggaran yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penanggung Jawab : Jamdatun.

f. Revisi terhadap Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penanggung Jawab : Jamdatun.

g. Revisi terhadap Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penanggung Jawab : Jamdatun.

#### **VI. BIDANG PENGAWASAN :**

a. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia Kejaksaan yang berlatar belakang akuntan untuk dididik menjadi auditor bekerjasama dengan instansi lain yang berkompeten.

Penanggung Jawab : Jamwas/Sesjamwas.

- b. Membangun aplikasi teknologi informasi yang dapat menyelenggarakan fungsi audit, review, pemantauan dan bimbingan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di daerah.  
Penanggung Jawab : Jamwas/Sesjamwas.
- c. Membangun mekanisme pengawasan melekat yang efektif dan efisien melalui *Whistle Blowing System* dan Unit Pengendali Gratifikasi.  
Penanggung Jawab : Jamwas/Sesjamwas.
- d. Membangun *data base* Laporan Pengaduan *on line* dan *Case Management System*.  
Penanggung Jawab : Jamwas/Sesjamwas.
- e. Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di daerah.  
Penanggung Jawab : Jamwas/Sesjamwas/Kajati/Kajari.
- f. Mendorong percepatan revisi Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-015/A/JA/07/2013 tentang Perubahan atas Perja Nomor PER-022/A/JA/03/2011 tentang Administrasi Pengawasan.  
Penanggung Jawab : Sesjamwas da Para Inspektur.
- g. *Zero* tunggakan laporan pengaduan.  
Penanggung Jawab : Jamwas/Kajati.
- h. Membuat batasan yang tegas terhadap laporan pengaduan yang masih bersifat teknis atau bersifat perilaku agar tidak menjadipemanfaatn sarana Pengawasan oleh pihak yang berkepentingan untuk menekan Jaksa atau menggagalkan penanganan perkara.  
Penanggung Jawab : Jamwas /Para Inspektur.
- i. Memberikan sanksi yang tegas dan mendukung proses hukum yang tegas bagi oknum Kejaksaan yang melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum (*Zero Tolerance*).  
Penanggung Jawab : Jamwas /Para Inspektur.

**VII. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :**

- a. Mempersiapkan SDM dan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung program Diklat *e-learning*.  
Penanggung Jawab : Kabandiklat dan Jambin.
- b. Meningkatkan kemampuan Bahasa Asing SDM Badan Diklat.  
Penanggung Jawab : Kabandiklat dan Jambin.
- c. Mempertahankan ISO dan Akreditasi Badan Diklat.  
Penanggung Jawab : Kabandiklat.
- d. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.  
Penanggung Jawab : Kabandiklat dan Jambin.
- e. Optimalisasi Fungsi Sentra Diklat.  
Penanggung Jawab : Kabandiklat, Jambin dan Kajati.

**VIII. BIDANG DUKUNGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI :**

- a. Diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola dan Pengembangan TI, termasuk pembentukan *steering committee* yang diketuai oleh Wakil Jaksa Agung, yang memiliki tugas dan fungsi memberikan arahan dan kebijakan, dukungan TI dalam rangka meningkatkan kinerja Kejaksaan.  
Penanggung Jawab : Kapus Daskrimti dan Karo Hukum.
- b. Penetapan standarisasi dengan menggunakan aplikasi TI, Kejati Jawa Barat sebagai acuan, dan mempertimbangkan keunggulan aplikasi pada unit kerja lainnya, serta pengembangan sistem aplikasi berbasis layanan digital mengenai *case management system* –CMS di bidang Pidsus, Pidum, Intelijen dan Datun beserta otomasi manajemen sistem dalam pengawasan pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan Badan Diklat.  
Penanggung Jawab : Kapus Daskrimti dan Kepala Biro Perencanaan.
- c. Terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang TI.

Penanggung Jawab : Kabandiklat dan Sentra Diklat Kejati.

- d. Optimalisasi SDM yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengembangan TI.

Penanggung Jawab : Kepala Biro Kepegawaian.

- e. Terwujudnya sistem *Data Base* Pemulihan Aset.

Penanggung Jawab : Kapus Pemulihan Aset dan Kapus Daskrimti.

**BAB IV****PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2017****ANGGARAN KEJAKSAAN RI PADA TAHUN ANGGARAN 2017****I. Pagu Indikatif 2017**

Berdasarkan surat bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI nomor : S-0163/M.PPN/05/2016 dan nomor : S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 hal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga TA 2017, Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2017 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4.636.775.337.000,- (empat triliun enam ratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian jenis belanja sebagai berikut :

1.	Belanja Pegawai Operasional	Rp.	2.830.979.537.000,-
2.	Belanja Barang Operasional	Rp.	562.026.800.000,-
3.	Belanja Barang Non Operasional	Rp.	<u>1.243.769.000.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	4.636.775.337.000,-

**II. Pagu Anggaran 2017**

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan RI nomor : S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017, untuk Tahun Anggaran 2017 Kejaksaan RI mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.725.275.337.000,- (empat triliun tujuh ratus dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian per jenis belanja sebagai berikut:



1.	Belanja Pegawai Operasional	Rp.	2.830.979.537.000,-
2.	Belanja Barang Operasional	Rp.	562.026.800.000,-
3.	Belanja Barang Non Operasional	Rp.	<u>1.332.269.000.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	4.725.275.337.000,-

**III. Penyesuaian (Penghematan) I Pagu Anggaran 2017**

Berdasarkan surat Menteri Keuangan RI Nomor :S-635/MK.02/2016 tanggal 5 Agustus 2017 hal Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L TA 2017, yang pada pokoknya bahwa menindaklanjuti arahan Presiden dalam rangka menjaga APBN yang sehat dan kredibel, Kejaksaan RI mendapat penghematan sebesar Rp. 438.519.110.000,- (empat ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah). Maka Pagu Anggaran Kejaksaan RI TA 2017 yang semula adalah Rp. 4.725.275.337.000,- (empat triliun tujuh ratus dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) turun menjadi Rp. 4.286.756.227.000,- (empat triliun dua ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

**IV. Penyesuaian (Penghematan) II Alokasi Anggaran 2017**

Berdasarkan surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-907/MK.02/2016 tanggal 31 Oktober 2016 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017, ditetapkan bahwa Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan RI TA 2017 yaitu sebesar Rp 4.104.707.642.000,- (empat triliun seratus empat milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan demikain Alokasi Anggaran Kejaksaan Tahun Anggaran 2017 berkurang sebesar Rp. 620.567.695.000,- (enam ratus dua puluh milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) dari Pagu Anggaran yang semula sebesar Rp. 4.725.275.337.000,- (empat triliun tujuh ratus dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Dengan Alokasi Anggaran yang sangat terbatas tersebut, maka beberapa kegiatan yang semula direncanakan memperoleh anggaran menjadi dibatalkan, yaitu antara lain kegiatan TP4D, PAKEM dan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di Kejari dan Cabjari, pengadaan genset di beberapa Satuan Kerja dan adanya penghematan pada beberapa kegiatan, antara lain perjalanan dinas, *in house training*, biaya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pembangunan tahap II beberapa Satuan Kerja, dan pembangunan gedung kantor untuk Satuan Kerja baru yaitu Kejari Kota Mojokerto dan Kejari Bombana.

Selanjutnya telah disusun Program Kerja dan Anggaran Tahun 2017 sebagai berikut :

#### **1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Alokasi Anggaran yang tersedia untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah sebesar Rp. 3.447.579.630.000,- (tiga trilyun empat ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ini mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar dibandingkan dengan program-program lain, karena seluruh belanja pegawai (kecuali Badan Diklat) dan biaya operasional (pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, langganan daya dan jasa, honor pramubakti, perjalanan dinas, biaya mutasi, seragam pegawai dan kebutuhan sehari-hari perkantoran) termasuk di dalamnya. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Belanja Pegawai untuk 523 Satuan Kerja sebesar Rp. 2.798.645.425.000,- (dua trilyun tujuh ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rinu Rupiah) termasuk tunjangan fungsional Jaksa dan tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan RI.

- b. Biaya operasional 2 (dua) Satuan Kerja baru yaitu Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Kejaksaan Negeri Bombana.
- c. Kegiatan Pelayanan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kerja Sama Hukum serta biaya operasional Perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri dengan volume 1 (satu) laporan dan 1 (satu) layanan.
- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dengan Indikator Kinerja Program Prioritas dari Bappenas yaitu jumlah laporan terkait pola perubahan rekrutmen, mutasi, promosi, *reward and punishment* dengan *volume* sebanyak 1 (satu) layanan.
- e. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI dengan *output* 1 (satu) layanan. Pada Tahun 2017 akan dilaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja seluruh Indonesia yang dilakukan di Sentra-sentra Kejaksaan, karena adanya perubahan aplikasi berbasis *web*.
- f. Kegiatan Perencanaan, pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksanaan, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Evaluasi dengan masing-masing *volume output* 1 (satu) layanan.
- g. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI dengan kegiatan mepalyani kebutuhan perlengkapan kantor untuk Satuan Kerja Kejaksaan Agung, dengan *volume output* 1 (satu) layanan.
- h. Kegiatan Pelayanan Ketatausahaan Kejaksaan RI, Pimpinan, Kerumahtangan, Keamanan dan Bina Kesejahteraan Pegawai, melayani pemeliharaan untuk Satuan Kerja Kejaksaan Agung, dengan *volume output* 1 (satu) layanan.
- i. Kegiatan Penyiapan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dengan *volume output* 1 (satu) layanan. Pada kegiatan ini terdapat Indikator Kinerja Program Prioritas Nasional dari Bappenas yaitu Implementasi Pilot Project Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) berbasis IT di 5 (lima) Kejaksaan Tinggi dan 5 (lima) Kejaksaan Negeri

yang berada di Ibukota Provinsi sebesar Rp. 6.194.000.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh empat juta Rupiah).

- j. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) penelitian.
- k. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dengan volume output 1 (satu) layanan.
- l. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait perkara, dengan *volume output* 1 (satu) laporan.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan**

Alokasi Anggaran yang tersedia untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan adalah sebesar Rp. 67.831.269.000,- (enam puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah), dengan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2017 yaitu :

- a. Penyediaan gedung/ruang bagi penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) berupa ruang diversi dan ruang tunggu anak, yang terpisah dengan orang dewasa di 50 (lima puluh) Kejaksaan Negeri dengan perkara ABH tertinggi, yang merupakan Program Prioritas dari Bappenas.
- b. Pembangunan gedung kantor 2 (dua) Kejaksaan Negeri yang baru dibentuk sesuai dengan Keppres Nomor 7 Tahun 2016, yaitu Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Kejaksaan Negeri Bombana, namun untuk pelaksanaannya harus menunggu izin pembangunan gedung kantor dari Presiden RI.
- c. Rehabilitasi gedung kantor yang terkena bencana dan kebakaran yaitu Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
- d. Pembangunan tahap II gedung kantor Kejaksaan Negeri Dairi, Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Kejaksaan Negeri Karo, Kejaksaan

Negeri Pasaman, Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Kejaksaan Negeri Bau-Bau.

- e. Tambah Daya Listrik bagi Satuan Kerja di daerah yang membutuhkan.
- f. Pengadaan komputer dan inventaris kantor lainnya untuk Satuan Kerja di daerah.
- g. Pengadaan Kendaraan Tahanan untuk kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Kejaksaan Negeri Bombana, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Kejaksaan Negeri Tiga Raksa.

### **3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan**

Alokasi yang tersedia untuk Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan adalah sebesar Rp. 20.654.624.000,- (dua puluh milyar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah), dengan perincian kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Layanan Perkantoran dengan satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, antar lain Inspeksi Umum, Pemantauan, Inspeksi Pimpinan, Inspeksi Kasus, Inspeksi Khusus, Supervisi, *Video Conference* Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dengan jajaran pengawasan di daerah, pelaksanaan *Whistleblowing System*, pelaksanaan Zona Integritas dengan volume output 1 (satu) layanan.
- b. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Tugas Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus serta Perdata dan Tata Usaha Negara, berupa kegiatan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi dengan volume output 36 (tiga puluh enam) laporan pengaduan pada masing-masing wilayah I sampai dengan V, dan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus dengan volume output 12 (dua belas) laporan pengaduan pada masing-masing wilayah I sampai dengan V.

- c. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan jajaran pengawasan di daerah, dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kegiatan ini merupakan Program Prioritas Nasional dari Bappenas adalah :
- Jumlah Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi sebanyak 1.255 (seribu dua ratus lima puluh lima) laporan untuk seluruh Kejaksaan Tinggi dan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) laporan untuk seluruh Kejaksaan Tinggi.
  - Pelaksanaan Inspeksi Umum pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) laporan.

#### **4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan**

Alokasi Anggaran untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan adalah sebesar Rp. 115.600.628.000,- (seratus lima juta milyar enam ratus juta enam ratus dua puluh delapan ribu Rupiah). Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, dengan indikator yang akan dicapai adalah Tersusunnya Rencana Program Kerja, Sarana dan Prasarana, anggaran, pengembangan dan kerjasama, serta pengelolaan data, laporan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan standarisasi pendidikan dan pelatihan, terselenggaranya pengelolaan urusan umum, kepegawaian, anggaran, perbendahraan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi, serta perlengkapan, perpustakaan dan dokumentasi, dengan volume output 1 (satu) layanan, termasuk belanja pegawai pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI sebesar Rp. 33.896.277.000,- ( tiga puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah).

- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan HAM untuk Jaksa sebanyak 2 (dua) angkatan yang merupakan Program Prioritas Nasional dari Bappenas.
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Aparat Penegak Hukum (Apgakum) untuk penanganan perkara yang mendukung SPPT sebanyak 2 (dua) angkatan yang juga merupakan Program Prioritas Nasional dari Bappenas.
- d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu (SPPAT) sebanyak 2 (dua) angkatan yang juga merupakan Program Prioritas Nasional dari Bappenas.
- e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental sebanyak 9 (sembilan) angkatan yang merupakan Program Prioritas Nasional dari Bappenas.
- f. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Pembentukan Jaksa dengan volume 15 (lima belas) angkatan.
- g. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kasus Intelijen dengan volume 2 (dua) angkatan.
- h. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan Bendahara dengan volume 2 (dua) angkatan.
- i. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan dengan volume 2 (dua) angkatan.
- j. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan TP4 dengan volume 2 (dua) angkatan.
- k. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan volume 2 (dua) angkatan.
- l. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan *Asset Recovery* dengan volume 2 (dua) angkatan.
- m. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan *Illegal Fishing* dan Diklat Mineral Batubara masing-masing dengan volume 2 (dua) angkatan.
- n. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Penyidikan dan Diklat *Human Trafficking* masing-masing dengan volume 2 (dua) angkatan.

- o. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan dengan volume 2 (dua) angkatan.
- p. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

**5. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum dan Pertahanan dan Keamanan**

Alokasi Anggaran untuk Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam adalah sebesar Rp. 41.288.627.000,- (empat puluh satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah), dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Layanan Perkantoran Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dengan indikator kegiatan yang akan dicapai adalah pelayanan Kesekretariatan di Bidang Jaksa Agung Muda Intelijen dengan volume 1 (satu) layanan.
- b. Kegiatan Penyelamatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah :
  - Jumlah kegiatan Intelijen Bidang Penyelamatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana sebanyak 50 (lima puluh) laporan.
  - Laporan Hasil Operasi Intelijen Bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan sebanyak 80 (delapan puluh) laporan.
  - Jumlah laporan Pelacakan Aset Tersangka Tindak Pidana sebanyak 70 (tujuh puluh) kegiatan.
  - Jumlah kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Tingkat Pusat (TP4P) sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan.



- c. Kegiatan Sandi dan Produksi Sarana Intelijen dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah :
  - Laporan Hasil Kegiatan dalam rangka Pengamanan Informasi Intelijen sebanyak 85 (delapan puluh lima) laporan.
  - Operasional *Monitoring Center* untuk 12 (dua belas) bulan layanan.
  - Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring Center Signal sebanyak 85 (delapan puluh lima) kegiatan.
- d. Kegiatan Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah :
  - Laporan Hasil Kegiatan Bidang Ideologi, Sosial, Politik, Pertahanan Keamanan dan Ketertiban Umum, dengan sasaran sebanyak 50 (lima puluh) laporan.
  - Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, dengan volume output 8 (delapan) laporan kegiatan.
- e. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah :
  - Lembaga yang diberi Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Agung sebanyak 16 (enam belas) lembaga.
  - Lembaga yang diberi Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Tinggi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembaga.
  - Lembaga yang diberi Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 841 (delapan ratus empat puluh satu) lembaga.
  - Kegiatan TP4D di Kejaksaan Tinggi sebanyak 86 (delapan puluh enam) kegiatan.
- f. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil kegiatan Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 554 (lima ratus lima puluh empat) laporan.

## 6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

Alokasi Anggaran untuk Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum adalah sebesar Rp. 196.609.836.000,- (seratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah), dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dengan volume 1 (satu) layanan.
- b. Kegiatan Eksekusi terpidana Mati sebanyak 12 (dua Belas) orang terpidana.
- c. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 667 (enam ratus enam puluh tujuh) perkara.
- d. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung yang diselesaikan dalam tahap penuntutan dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) perkara.
- e. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Satuan Kerja daerah yang merupakan Program Prioritas Nasional dari Bappenas yang dapat dibiayai yaitu :
  - 53.036 (lima puluh tiga ribu tiga puluh enam) perkara di tingkat Pra Penuntutan.
  - 48.358 (empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan) perkara di tingkat Penuntutan.
  - 51.163 (lima puluh satu ribu seratus enam puluh tiga) perkara di tingkat Eksekusi.
- f. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu untuk penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) yang merupakan Program Prioritas Nasional dari Bappenas yang dibiayai di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri adalah :

- 129 (seratus dua puluh sembilan) perkara di tingkat Pra Penuntutan.
  - 88 (delapan puluh delapan) perkara di tingkat Penuntutan.
  - 60 (enam puluh) perkara di tingkat Eksekusi.
- g. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dengan indikator kinerja sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara.

**7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Alokasi Anggaran untuk Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar Rp. 200.240.499.000,- (dua ratus milyar dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah). Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Kegiatan Layanan Perkantoran Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah 1 (satu) layanan.
- b. Kegiatan Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung yang merupakan Program Prioritas Nasional dari Bappenas dengan indikator yang akan dicapai adalah :
  - Jumlah kegiatan Penyelidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan sebanyak 50 (lima puluh) perkara.
  - Jumlah kegiatan Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara.
  - Jumlah Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya diselesaikan sebanyak 3 (tiga) perkara.
  - Jumlah kegiatan Penyidikan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat diselesaikan sebanyak 2 (dua) perkara.

- Jumlah Penanganan Pra Peradilan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara.
- c. Kegiatan Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung yang merupakan Program Prioritas Nasional dari Bappenas dengan indikator yang akan dicapai adalah :
  - Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan sebanyak 140 (seratus empat puluh) perkara.
  - Jumlah Perkara Pelanggaran HAM yang Berat diselesaikan sebanyak 1 (satu) perkara.
  - Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan sebanyak 30 (tiga puluh) perkara.
- d. Kegiatan Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi dengan indikator yang akan dicapai yaitu pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya/Pelanggaran HAM yang Berat Terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan sebanyak 10 (sepuluh) perkara.
- e. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang merupakan Program Prioritas Nasional dari Bappenas dengan indikator yang akan dicapai sebagai berikut :
  - Jumlah Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) perkara.
  - Jumlah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 649 (enam ratus empat puluh sembilan) perkara.

- Jumlah Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 1.057 (seribu lima puluh tujuh) perkara.
- Jumlah Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara.
- Jumlah Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi/ Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 657 (enam ratus lima puluh tujuh) perkara.

**8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara**

Alokasi Anggaran untuk Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sebesar Rp. 14.902.529.000,- (empat belas milyar sembilan ratus dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah). Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan indikator kinerja yang akan dicapai sebanyak 1 (satu) layanan.
- b. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dengan indikator kinerja perkara perdata yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non Litigasi di Kejaksaan Agung sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara.
- c. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara dengan indikator perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Agung sebanyak 80 (delapan puluh) perkara.
- d. Kegiatan Penanganan Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak dengan indikator perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak yang

diselesaikan melalui Litigasi dan Non Litigasi di Kejaksaan Agung sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) perkara.

- e. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dengan indikator diselesaikannya penanganan Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun di Cabang Kejaksaan Negeri yaitu :
- Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang diselesaikan secara Litigasi, dengan target sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) perkara.
  - Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang diselesaikan secara Non Litigasi, dengan target sebanyak 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) perkara.
  - Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan tinggi dan Kejaksaan Negeri dengan *volume output* sebanyak 4.832 (empat ribu delapan ratus tiga puluh dua) media.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2017 ini, maka diharapkan agar para pejabat Eselon I dan Eselon II di Kejaksaan Agung , Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di luar negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2017 untuk masing-masing Bidang/Unit Kerjanya serta menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama satu tahun, dan menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing Bidang/ Unit Kerja haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan ini.

Rencana Kerja yang telah disusun oleh masing-masing pejabat yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja ini harus dikirimkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagai bentuk laporan bahwa masing-masing pejabat telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang menjadi kewajibannya.

Dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran, agar selalu dipedomani peraturan-peraturan terkait, untuk meningkatkan penilaian opini BPK terhadap laporan keuangan Kejaksaan RI. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian kinerja pada aplikasi e monev Kementerian Keuangan dan Bappenas, agar penilaian kinerja Kejaksaan RI semakin meningkat, sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan *Reward* dari Kemeterian Keuangan berupa penambahan anggaran. Hal ini diperlukan adanya komitmen bersama antara Pimpinan Satuan Kerja baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan selama tahun 2017 ini, maka diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan baik di Pusat maupun di daerah untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan dapat semakin meningkat

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

H.M. PRASETYO



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

**UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI ACEH.**

**FORMULIR RKT**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	-	110.881.642.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layanan dukungan Manajemen Eselon I Layanan Perkantoran	25 Layanan 47 Layanan	1.675.552.000 108.968.090.000	KAJATI/ KAJARI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan Operasional serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Daerah dan Pusat	22 sarana/prasarana	672.000.000	KAJATI
006.01.03	Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan (Lapdu) yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.	-	-	465.789.000	KAJATI
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejati, Kejari, Cabjari	32 Kegiatan 60 Lapdu	187.189.000 204.000.000	KAJATI/KEJARI DAN KACABJARI
			Laporan Pengaduan yang		10 Lapdu	74.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan Kejati, Kejari dan Cabjari	-	KEJATI/KEJARI/ DAN KACABJAR
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya di lingkungan Kejaksaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/Pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen di Kejari/Cabjari	26 laporan	362.704.000
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Burou Tindak Pidana/DPO yang ditangkap	1 Kegiatan	15.000.000
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejati	4 Kegiatan	37.840.000
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	46 Kegiatan	435.160.000
				Penguatan Jaringan Masyarakat anti KKN di Kejari dan Kejari dan TP4D	3 Kegiatan	15.000.000
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum		Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.			5.820.250.000
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara PIDUM yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	1556 perkara	894.280.000
						KAJATI
						KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	1376 perkara	4.097.580.000	
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari/Cabjari satu kota dengan Pengadilan Negeri	1376 perkara	458.390.000	
				Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan, penuntutan dan eksekusi di Kejari dan Cabjari tidak satu kota / pulau dengan Pengadilan Negeri	10 perkara	20.720.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan pda Kejati, Kejari dan Cabjari	10 perkara	272.980.000	
				Perkara pidana umum tertentu yang diselesaikan dalam tahap eksekusi pada Kejati, Kejari, Cabjari	10 perkara	76.300.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	-	-	8.451.090.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/ KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi	5 perkara	200.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	24 kasus	1.200.000	
				Kasus tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap penyelidikan dan penyidikan di Kejari/Cabjari	24 kasus	3.600.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap penyidikan di Kejari, Cabjari.	4 perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati, Kejari dan Cabjari	1 perkara	37.910.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari WII I	4 perkara	265.140.000	
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari, Cabjari WII II	4 perkara	331.800.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari, Cabjari WII III	37 perkara	3.811.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejati, Kejari dan Cabjari.	34 perkara	55.240.000	
006.01.	Program Penanganan Dan	-	Terlaksananya penanganan perkara	-	-	339.345.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
09	Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara		Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara				
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara , Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari (Litigasi)	5 perkara	60.575.000	KAJATI/ KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari dan Cabjari (non litigasi)	76 perkara	228.000.000	
				Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	276 Media	141.000.000	

## RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

### UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA.

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI.	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	-	190.060.819.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layana Perkantoran	456 Layanan	187.031.426.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	-	-	5.950.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ prasarana	5.950.000.000	-
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	-	Jumlah laporan pengaduan (Lapdu) yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat	-	-	929.140.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	cermat, proposional dan akuntabel. Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Peaksanaan Inspeksi	28 kegiatan	380.000.000	KAJATI/KEJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejati, Kejari yang terdapat cabang Kejaksaan Negeri	150 lapdu	435.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejati, Kejari yang terdapat Cabjari	25 lapdu	114.140.000	
006.01.06	Program penyelidikan/ pengamanan/peng galangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	Program penyelidikan/ pengamanan/peng galangan Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.222.764.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJAR
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya dilingkungan Kejaksaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/p enggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	39 Laporan	540.024.000	
				Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana/DPO	1 kegiatan	15.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejari dan Cabjari.	4 Kegiatan 65 Kegiatan 3 Kegiatan	37.840.000 614.900.000 15.000.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	-	-	16.495.200.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari	3877 perkara 3563 perkara 3563 perkara	1.605.170.000 13.745.680.000 774.350.000	KAJATI, KAJARI DAN KACABJARI
006.01.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana	-	-	370.000.000 12.312450.000	KAJATI



KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
08	Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi		Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Tinggi  Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi  Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati  Kasus tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan dan penyidikan di Kejari/Cabjari  Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati, Kejari dan Cabjari  Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari/Cabjari wil. I  Perkara Tindak Pidana	2 kasus  2 perkara  37 perkara  37 kasus  2 perkara  4 perkara  6 perkara	100.000.000  200.000.000  1.850.000.000  3.700.000.000  37.910.000  339.224.000  284.400.000	KAJATI, KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	Korupsi yang diselesaikan pada tahap Pra penuntutan di Kejari/Cabjari Wil. II			
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari wil III	55 perkara	5.665.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejati, Kejari, dan Cabjari	38 perkara	71.620.000	
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	Terseleksainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara , Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	-	-	528.575.000	KAJATI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari (Litigasi)	5 perkara	60.575.000	KAJATI, KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari dan Cabjari (non litigasi)	97 perkara	291.000.000	
				Operasional Pos Media Informati dan Pelayanan Hukum Gratis	348 Media	177.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI JAMBI.				FORMULIR RKT		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDW, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	64.761.488.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	13 layanan	777.606.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan.	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di Daerah, pusat Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	-	48.357.000	KAJATI
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	1 kegiatan	48.357.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03097	Program Peningkatan dan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan (Lapdu) yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.	-	399.246.000	KAJATI
	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati,	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang	3 kegiatan	71.726.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Kejari dan Cabjari.	Kejaksaaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	pada Kejaksaaan Tinggi, Kejaksaaan Negeri dan Cabang Kejaksaaan Negeri	Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi Pada Kejaksaaan Tinggi, Kejari, Dan Terdapat Cabjari	70 Lapdu	238.000.000	
006.01.06	Program penyelidikan/ pengaman an/penggalangan di permasalahan IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	Program penyelidikan/ pengamanan/peng galangan Kejari, Kejari dan Cabjari	-	474.984.000	KAJATI/KEJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejari, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya dilingkungan Kejaksaaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan an/pengamanan/penggalangan di Kejaksaaan Tinggi, Kejaksaaan Negeri dan Cabang Kejaksaaan Negeri	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan /penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaaan Tinggi	14 laporan	199.024.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terseleenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Pencarian/penangkapan buron tindak pidana/DPO	1 kegiatan	15.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat,	<b>Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari dan Cabjari</b> Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejati dan Kejari	26 kegiatan 3 Kegiatan	245.960.000 15.000.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
						<b>2.656.500.000</b>	<b>KAJATI</b>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Umum		tepat dan akuntabel.	Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Kejari	738 perkara	515.800.000	
				Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari, Cabjari satu kota dengan pengadilan Negeri	638 perkara	2.233.000.000	
				Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari tidak satu kota dengan Pengadilan Negeri	692 perkara	267.185.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	-	-	3.732.470.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, dan Cabang Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 kasus	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap penyidikan di Kejati	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyidikan di Kejari, Cabjari	12 kasus	600.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap penyidikan di Kejari dan Cabjari	12 perkara	1.200.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati dan Cabjari Wil I	11 perkara	486.090.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati dan Cabjari Wil. II	6 Perkara	284.400.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati dan Cabjari Wil. III Jambi	9 perkara	733.950.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana di tahanan dalam rumah tahanan di Kejati, Kejari dan Cabjari	22 perkara	65.120.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedur (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara	-	-	249.575.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan	Terseleksinya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara , Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari (Litigas)	5 perkara	60.575.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari dan	42 perkara	120.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		peraturan Perundang-undangan.		Cabjari (non litigasi) Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	132 media	69.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI		Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan			111.733.791.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, dan Cabang Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layana Perkantoran	169 Layanan	110.703.801.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan		Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	15 Layanan	1.029.990.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ prasarana	30.000.000	-
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan		Jumlah laporan pengaduan (Lapdu) yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.			436.118.000	KAJATI

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN.

FORMULIR RKT



KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyialangunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejati, Kejari, dan Cabjari	35 lapdu	101.500.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/ pengamanan/peng galian IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam		Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	Program penyelidikan/ pengamanan/peng galian Kejati, Kejari dan Cabjari	30 Kegiatan 10 lapdu	255.080.000 79.538.000	
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya di lingkungan Kejaksaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	31 kegiatan	293.260.000	KEJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Penguatan jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari dan TP4D	3 kegiatan	15.000.000	
006.01.	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana		Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat,	Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari dan Cabjari. Penguatan Jaringan Masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari dan TP4D	31 Kegiatan 3 Kegiatan	293.260.000 15.000.000	KEJATI/KAJARI DAN KACABJARI
						9.924.000.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
07	Umum		tepat dan akuntabel.				
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	3910 perkara	1.626.515.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari/Cabjari satu kota dengan Pengadilan	3610 perkara	7.238.675.000	
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari dan Cabjari tidak satu kota dengan Pengadilan Negeri	3570 perkara	688.810.000	
				Perkara Pidana Umum tertentu yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	20 perkara	370.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi		Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel			4.522.190.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi	16 Perkara	800.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyidikan di Kejati	16 perkara	1.600.000.000	
				Perkara Tindak Pidana	35	2.041.640.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara			Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Kejati	perkara		
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati, Kejari dan Cabjari	3 perkara	37.910.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	15 perkara	42.640.000	
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.			291.575.000	KAJATI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari (Litigasi)	5 perkara	60.575.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari dan Cabjari (non litigasi)	48 perkara	144.000.000	
				Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	168 Media	87.000.000	

## RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU				FORMULIR RKT		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	-	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layana Dukungan Manajemen Eselon I	10 Layanan	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	-	-	120.000.000
006.01.03	Program Peningkatan dan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Sarna dan Prasarana Di Pusat dan Daerah	1 Sarna/ Prasarana	120.000.000
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan	-	-	171.989.000
			Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat		30 lapdu	102.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
		perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Cabjari		KACABJARI
				Pelaksanaan Inspeksi	8 Kegiatan	32.686.000
				Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	5 Lapdu	37.300.000
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang EPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalang di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	396.224.000
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya dilingkungan Kejaksaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	11 Laporan	158.104.000
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terseleenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Pencarian/penangkapan buron tindak pidana/DPO	1 kegiatan	15.000.000
				Lembaga yang telah diberi Penyuluhan Hukum pada Kejati.	4 kegiatan	37.840.000
				Lembaga yang telah diberi Penyuluhan Hukum pada Kejari/Kejari.	18 Kegiatan	170.280.000
				Penguatan jaringan masyarakat anti KKN di Kejati Kejari dan TP4D	3 kegiatan	15.000.000
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	-	-	1.872.500.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan pada Kejati	576 perkara	216.100.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari/Cabjari satu kota dengan Pengadilan	501 perkara	1.382.500.000	
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari/Cabjari tidak satu kota dengan Pengadilan Negeri dan atau Lembaga	529 perkara	274.300.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	-	-	3.006.590.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan penuntutan an di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Kasus tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi	9 Kasus	450.000.000	
			Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan dan penyidikan di Kajari dan Cabjari	9 Perkara	900.000.000		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari	6 perkara	265.140.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari	4 perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari WII. II	1 perkara	37.910.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari WII. III	10 perkara	474.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana di tahanan dalam rumah tahanan di Kejati, Kejari dan Cabjari	10perkara	493.000.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	-	-	228.576.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan	Terseleksikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara , Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari dan Cabjari (Litigasi)	5 perkara	60.575.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/	35 perkara	105.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		peraturan Perundang-undangan.		Cabjari (Non litigasi)			
				Operasional Pos Media informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	120 Media	63.000.000	



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG				FORMULIR RKT		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	90.549.807.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Jaksa Agung Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layana Perkantoran 15 Layanan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 15 Layanan	90.039.819.000 509.988.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	Sasaran dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	900.000.000 900.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Peningkatan dan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.	-	232.010.000	KAJATI
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pelaksanaan inspeksi 12 Kegiatan Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejati, Kejari yang ada Cabjari 35 Lapdu	75.710.000 119.000.000	KAJATI/KEJAR DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang EPOLEKOSBUD Hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejati, Kejari yang terdapat Cabjari	5 Lapdu	37.300.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJAR
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelidikan dan Pengamanan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya dilingkungan Kejaksaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/pe nggalangan kasus intelijen di Kejati	2 Laporan	35.344.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus intelijen di Kejari dan Cabjari	14 laporan	190.960.000	
				Pencarian/penangkapan buron tindak pidana/DPO	4 Laporan	15.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	4 Kegiatan	37.840.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	24 Kegiatan	227.040.000	
				Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejati dan Kejari dan TP4D	4 Kegiatan	15.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	-	-	5.093.250.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap pra	1710	651.085.000	KAJATI/KAJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Secara Cepat dan Akuntabel	di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	Perkara		DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	1610 Perkara	4.128.240.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari	17000 Perkara	313.925.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	-	-	4.143.390.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejati	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyidikan di Kejati	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari dan Cabjari	16 kasus	700.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyidikan di Kejari dan Cabjari	16 kasus	1.400.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejati	4 perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap	1 perkara	37.910.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				pra penuntutan dan penuntutan di Kejati, Kejari dan Cabjari			
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari dan Cabjari WII I	13 perkara	580.890.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari dan Cabjari WII II	8 Perkara	379.200.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari WII. III	7 Perkara	652.750.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/ tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejari, Kejari dan Cabjari	1 perkara	1.260.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejari, Kejari dan Cabjari	23 perkara	41.360.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	-	-	255.575.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan	Tersebaiknya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara , Kegiatan pertimbangan hukum,	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari	5 perkara	60.575.000	KAJATI/KAJARI DAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelenggarakan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	dan Cabjari (Litigasi)	42 perkara	126.000.000	KACABJARI
				Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	132 media	69.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA			S A S A R A N			FORMULIR RKT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	-	100.133.799.000	
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layanan Perkantoran	6 layanan	99.570.677.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1091	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	-	Sarana dan Prasarana Kejaksaan Ri di Pusat dan Daerah.	Sarana prasarana	21 sarana prasarana	43.000.000	
006.01.03	Program Peningkatan dan Penguasaan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan (Lapdu) yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akurat.	-	-	510.935.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1097	Peningkatan Penguasaan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejati, Kejari yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	100 Lapdu	340.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejati, kejari yang terdapat Cabang Kejaksaan negeri	20 Lapdu	149.200.000	
006.01.06	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akurat, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun	Pelaksanaan Inspeksi	3 kegiatan	21.735.000	
				-	-	265.984.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya dilingkungan Kejaksaan RI	repressif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/p enggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	2 Laporan	103.544.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan.	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana/DPO yang ditangkap	1 kegiatan	15.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	Lembaga yang telah diberi penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi	4 Kegiatan	37.840.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Lembaga yang diberi penerangan hukum pada Kejari dan Cabjari	10 Kegiatan	94.600.000	
				Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejati dan Kejari, dan Kejari dan TP4D	3 Kegiatan	15.000.000	
					-	1.787.870.000	
				Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap pra Penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	3175 perkara	870.450.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	2925 perkara	9.144.470.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	-	3175 perkara	722.580.000	
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	3 perkara	150.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari dan Cabjari	5 Kasus	250.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap penyidikan di Kejari dan Cabjari	5 perkara	500.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejati	4 perkara	14.296.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati, Kejari dan Cabjari	1 perkara	37.910.000	



KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati, Kejari dan Cabjari Wil I	14 Perkara	604.364.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejati, Kejari dan Cabjari	1 perkara	25.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejati, Kejari dan Cabjari	5 perkara	6.300.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	-	-	229.150.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari/Kejari/ Cabjari (Litigasi)	10 perkara	121.150.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari dan Cabjari (non litigasi).	23 perkara	69.000.000	
				Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	72 media	39.000.000	

## RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT				S A S A R A N			FORMULIR RKT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
006.01. 01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	-	215.757.206.000		
1090	Dukungan Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya dan Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layanan Perkantoran	12 layanan	213.066.946.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI	
006.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	-	-	2.500.000.000		
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	13 Sarana/ Prasarana	2.500.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI	
006.01. 03	Program Peningkatan dan Penguatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.	-	-	586.889.000		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang di daerah.	100 lapdu	340.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.				97.689.000	
						149.200.000	
006.01.06	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	-	-	391.344.000	
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya dilingkungan Kejaksaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/p enggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	2 laporan	35.344.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
						341.000.000	
						15.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan.	Terselesingnya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Lembaga yang telah diberi penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi	4 Kegiatan	37.840.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
						473.000.000	
						15.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat,	-	-	12.335.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	<b>Umum</b>		<b>tepat dan akuntabel.</b>				
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan pada Kejati, Kejati dan Cabjari	3610 perkara	<b>1.605.864.000</b>	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati, Kejari dan Cabjari	3410 perkara	<b>9.480.900.000</b>	
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Eksaminasi dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari	3480 perkara	<b>1.248.236.000</b>	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	-	-	<b>7.371.710.000</b>	
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	<b>100.000.000</b>	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap Penyelidikan di Kejari dan Cabjari	4 perkara	2.500.000.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, pelaksanaan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejati.	4 perkara	50.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari dan Cabjari	1 perkara	37.910.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari/Cabjari wii I	10 perkara	441.900.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan para tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari/Cabjari Wiii II	26 perkara	1.232.400.000	
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari/Cabjari Wiii III	9 kasus	1.503.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Tinggi (di Splitsing)	27 Perkara	56.500.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	-	-	468.575.000	
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejari, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	Terseleksainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejari, Kejari maupun Cabjari.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/ Cabjari (Litigasi)	5 perkara	60.575.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari dan Cabjari (non litigasi).	83 perkara	249.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	26 media	159.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH				FORMULIR RKT		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-		238.750.142.000
1090	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya dan Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layanan Perkantoran	456 layanan	237.044.334.000
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	Layanan dukungan manajemen eselon I	38 layanan	1.705.808.000
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	235 Sarana/ Prasarana	1.175.000.000
006.01.03	Program Peningkatan dan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.	-	-	529.517.000
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang di daerah.	70 lapdu	238.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.		<p>Peaksanaan Inspeksi</p> <p>Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pda Kejati, Kejari dan Cabjari</p>	<p>35 kegiatan</p> <p>12 Lapdu</p>	<p>201.997.000</p> <p>89.520.000</p>	
006.01.06	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Pengalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Pengalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	-	-	1.298.444.000	
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Pengalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelidikan, Pengamanan dan Pengalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya dilingkungan Kejaksaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/pengalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	<p>Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ pengalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Pencarian/Penangapan Buron Tindak Pidana/DPO yang ditangkap</p>	<p>39 laporan</p> <p>1 kegiatan</p>	<p>540.024.000</p> <p>15.000.000</p>	<p>KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI</p> <p>KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI</p>
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan.	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	<p>Lembaga yang telah diberi penerangan Hukum pada Kejari/Kejari</p> <p>Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejati dan Kejari dan TP4D</p>	<p>77 kegiatan</p> <p>3 kegiatan</p>	<p>728.420.000</p> <p>15.000.000</p>	<p>KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI</p> <p>KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI</p>
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	-	-	11.365.500.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan pada kejati/kejari Cabjari	3303 perkara	1.499.052.000	



KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan di Kejati, Kejari dan Cabjari	3173 perkara	8.808.445.000	
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati Kejari/Cabjari	3641 perkara	1.058.003.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	-	-	11.218.840.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejari/Cabjari.	39 kasus	1.950.000.000	
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejati Kejari dan Cabjari	2 perkara	37.910.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari Wil I	13 Perkara	289.948.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari Wil II	26 perkara	1.304.600.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari Wil III	21 perkara	3.507.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan, Kejaksaan dan Cabjari.	94 perkara	229.382.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	-	-	636.575.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan, Kejaksaan dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	Terseleksananya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejaksaan, Kejaksaan maupun Cabjari.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan/ Cabjari (Litigasi)	5 perkara	60.575.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan dan Cabjari (non litigasi).	117 perkara	351.000.000	
				Operasional Pos Media Informatasi dan Pelayanan Hukum Gratis	444 media	225.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA			FORMULIR RKT		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N		PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	
				VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	94.089.842.000
1090	Dukungan Manajemen dan Peningkatan Kinerja Kejaksaan Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya dan Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	17 Layanan	92.905.878.000
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	6 Layanan	1.183.964.000
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	1 Sarana	45.000.000
006.01.03	Program Peningkatan dan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan (Lapdu) yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.	-	127.035.000
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan	3 kegiatan	21.735.000
			Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui	20 Lapdu	68.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.06	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD dan Hukum dan Hankam	perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	klarifikasi pada Kejati, Kejari dan Cabjari	5 Lapdu	37.300.000	
006.01.06	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD dan Hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	-	-	265.984.000	
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya di lingkungan Kejaksaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	7 Laporan	103.544.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan.	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Lembaga yang telah diberi penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi	4 kegiatan	37.840.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	Buron Tindak Pidana/DPO yang ditangkap	3 kegiatan	15.000.000	
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan dan Cabjari	10 kegiatan	94.600.000	
				Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejati dan Kejari	3 kegiatan	15.000.000	
				-	-	1.978.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap pra Penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	608 perkara	511.600.000	
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	508 perkara	1.281.790.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari	558 perkara	184.610.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	-	-	1.787.870.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari dan Cabjari	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di Kejari dan Cabjari	5 Kasus	250.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap penyelidikan di Kejari dan Cabjari	5 Perkara	500.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejati	4 Perkara	34.160.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejati, Kejari dan Cabjari	9 perkara	142.130.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan di Kejari dan Cabjari wil I	12 Perkara	530.280.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejati, Kejari dan Cabjari	10 Perkara	31.300.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedur (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	-	-	168.575.000	
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	Terseleksainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/ Cabjari (Litigasi)	5 perkara	60.575.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari dan Cabjari (non litigasi).	23 perkara	69.000.000	
				Operasional Pos Media Informatasi dan Pelayanan Hukum Gratis	72 Media	39.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR				S A S A R A N			FORMULIR RKT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
006.01. 01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	-	265.464.038.000		
1090	Dukungan Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya dan Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layanan Perkantoran  Layanan dukungan manajemen eselon I	39 layanan  39 Layanan	262.525.368.000  2.938.670.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI	
006.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	-	-	11.225.000.000		
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	10 Sarana/ Prasarana	11.225.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI	
006.01. 03	Program Peningkatan dan Penguatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.	-	-	410.818.000		
1097	Peningkatan Penguasaan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati,	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejati, Kejari	25 Lapdu	111.250.000	KAJATI/KAJARI DAN	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Kejari dan Cabjari.	Kejaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	pada Kejaksanaan Tinggi. Kejaksanaan Negeri dan Cabang Kejaksanaan Negeri	yang terdapat Cabang Kejaksanaan Negeri	11 Lapdu	52.250.000	KACABJARI
006.01.06	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka pendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	-	-	247.318.000	1.340.464.000
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya dilingkungan Kejaksanaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/penggalangan di Kejaksanaan Tinggi, Kejaksanaan Negeri dan Cabang Kejaksanaan Negeri	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejari dan Cabjari	40 Laporan	553.664.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan.	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana/DPO yang ditangkap.	1 kegiatan	15.000.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksanaan Tinggi	4 Kegiatan	37.840.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksanaan Negeri / Cabang Kejaksanaan Negeri	76 Kegiatan	718.960.000	



KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejati dan Kejari, dan TP4D	3 Kegiatan	15.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	-	-	20.488.000.000	
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari dan Cabjari	7603 Perkara	1.819.550.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari/Cabjari satu kota dengan Pengadialan	7603 perkara	16.814.510.000	
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	7594 Perkara	1.863.940.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	-	-	12.277.490.000	
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di Kejati	2 Perkara	100.000.0000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	200.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kasus tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di Kejari/Cabjari	38 Kasus	1.900.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari can Cabjari	38 Perkara	3.800.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan para tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejati	1 Perkara	50.000.000	
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejati/ Kejari/Cabjari.	1 Perkara	37.910.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan cabang Kejaksaan Negeri	46 Perkara	72.880.000	
				Perkara Tinak Pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/ Cabjari WII I	8 perkara	441.900.000	
				Perkara Tinak Pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/ Cabjari WII II	33 perkara	1.042.800.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tinak Pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/ Cabjari WII III	48 perkara	4.632.000.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	-	-	663.575.000	
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari/Kejari/ Cabjari (Litigasi)	5 Perkara	60.575.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari dan Cabjari (non litigasi).	122 Perkara	366.000.000	
				Operasional Pos Media Informatasi dan Pelayanan Hukum Gratis	468 media	237.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA.				S A S A R A N			FORMULIR RKT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
006.01. 01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	-	62.190.008.000	KAJATI	
1090	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya dan Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layanan Perkantoran	25 Layanan	61.036.148.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI	
006.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	-	-	600.000.000	KAJATI	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	Sarana dan Prasarana Kejaksaan Pusat dan Daerah	14 Sarana/ Prasarana	600.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI	
006.01. 03	Program Peningkatan dan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan (Lapdu) yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.	-	-	218.231.000	KAJATI	
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pelaksanaan Inspeksi	3 kegiatan	134.400.000	KAJATI/KAJARI DAN	
				Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri	10 Lapdu	40.000.000	KACABJARI	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		Jaksa Agung.		yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri			
				Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	6 Lapdu	43.831.000	
006.01.06	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Pengalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD dan Hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Pengalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan okum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	-	-	507.544.000	KEJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Pengalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelidikan, Pengamanan dan Pengalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan okum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya di lingkungan Kejaksaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/ pengalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ pengamanan/ pengalangan kasus Intelijen di Kejati, Kejari dan Cabjari	17 laporan	212.664.000	
				Lemaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari dan Cabjari	24 kegiatan	227.040.000	
				Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejati dan Kejari dan TP4D	3 Kegiatan	15.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	4 kegiatan	37.840.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari dan Cabjari	24 Kegiatan	227.040.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	-	3 Kegiatan	15.000.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	673 Perkara	319.400.000	KAJATI/ KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan Pada Kejati, Kejari dan Cabjari	649 Perkara	2.106.540.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari dan Cabjari	684 Perkara	296.010.000	
				Perkara Pidana Umum tertentu yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	10 Perkara	20.720.000	
				Perkara Pidana Umum tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	10 Perkara	272.980.000	
				Perkara Pidana Umum tertentu yang diselesaikan dalam tahap eksekusi pada Kejati, Kejari dan Cabjari	10 Perkara	76.300.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat,	-	-	4.910.430.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Korupsi  Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	<p><b>professional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel</b></p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri</p>				
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Kasus	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di Kejari dan Cabjari	13 kasus	650.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyidikan di Kejari dan Cabjari.	13 Perkara	1.300.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	5 Perkara	50.000;000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	28 perkara	2.531.140.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di kejaksaan negeri/cabang kejaksaan negeri.	1 Perkara	37.910.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Dalam Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kejati, Kejari dan Cabjari	14 perkara	41.380.000	
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara , Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari dan Cabjari (Litigasi)	5 perkara	60.575.000	KAJATI/ KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	43 perkara	129.000.000	
				Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	144 media	75.000.000	



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH.				FORMULIR RKT		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	S A S A R A N		PENANGGUNG JAWAB
				OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	-	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya dan Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layana Perkantoran	267 Layanan	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	-	-	KAJATI
1091	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	900 Sarana/ prasarana	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Peningkatan dan Penguasaan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan (Lapdu) yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.	-	-	KAJATI
1097	Peningkatan Penguasaan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pelaksanaan Inspeksi	2 Kegiatan	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejati, Kejari dan Cabjari	5 Lapdu	37.300.000
						500.000.000
						59.901.322.000
						59.144.516.000
						756.806.000
						500.000.000
						500.000.000
						357.310.000
						218.310.000
						37.300.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		Jaksa Agung.		Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejati, Kejari yang terdapat Cabjari	30 Lapdu	102.000.000	
006.01.06	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan okum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	-	-	752.184.000	KEJATI/KAJARI DAN KACABJAR
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya di lingkungan Kejaksaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	26 Laporan	362.704.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Lembaga yang telah diberi Penerimaan Hukum pada Kejati. Lembaga yang telah diberi Penerimaan Hukum pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri. Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejati dan Kejari dan TP4D	4 Kegiatan 34 Kegiatan 3 Laporan	37.840.000 321.640.000 15.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	-	-	4.353.600.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati, Kejari dan Cabjari	859 Perkara	254.600.000	KAJATI/ KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari/Cabjari.	824 Perkara	3.814.850.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari	869 Perkara	184.150.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	-	-	7.396.290.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Kasus	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di Kejari dan Cabjari	24 kasus	1.200.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di Kejari dan Cabjari	24 perkara	2.400.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Kejaksaan Tinggi	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejati, Kejari dan Cabjari	1 Perkara	50.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari dan Cabjari WII I	6 Perkara	265.140.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari dan Cabjari WII III	32 Perkara	3.088.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana korupsi tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejari dan Cabjari	1 perkara	1.260.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejati, Kejari dan Cabjari	24 perkara	53.980.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan	-	-	265.575.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.				
			Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari dan Cabjari (Litigasi)	5 perkara	60.575.000	KAJATI/ KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	52 perkara	156.000.000	
				Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	132 media	69.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA.				FORMULIR RKT		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	S A S A R A N		PENANGGUNG JAWAB
				OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	-	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya dan Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layana Perkantoran	88 Layanan	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	-	-	KAJATI
1091	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum.	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	3 Sarana prasarana	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Peningkatan Aparatur Kejaksaan dan Peningkatan Akuntabilitas	-	Jumlah laporan pengaduan (Lapdu) yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.	-	-	KAJATI
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur	Meningkatnya kualitas pengawasan	Jumlah laporan pengaduan masyarakat	Pelaksanaan Inspeksi	3 Kegiatan	KAJATI/KAJARI
						10.054.000.000
						18.215.000
						85.711.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Kejaksaaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran pengawasan di daerah	atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaaan Tinggi, Kejaksaaan Negeri dan Cabang Kejaksaaan Negeri	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui Klifikasi pada Kejati, Kejari yang terdapat Cabjari	20 Lapdu	113.215.000	DAN KACABJARI
006.01.06	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Pengalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Pengalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan 280okum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	-	-	428.784.000	KEJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Pengalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Pengamanan dan Pengalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya dilingkungan Kejaksaaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/pengalangan di Kejaksaaan Tinggi, Kejaksaaan Negeri dan Cabang Kejaksaaan Negeri	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ pengalangan kasus Intelijen di Kejati, Kejari dan Cabjari	12 Laporan	171.744.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Buron Tindak Pidana/DPO yang ditangkap	1 Kegiatan	15.000.000	
				Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	4 Kegiatan	37.840.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaaan Negeri/Cabang Kejaksaaan Negeri	20 Kegiatan	189.200.000	
				Penguatan Jaringan Masyarakat anti KKN di	3 Kegiatan	15.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kejati dan Kejati dan TP4D			
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	-	-	2.957.500.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan Dan Penuntutan Di Kejati	692 Perkara	234.772.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan Dan Penuntutan Di Kejati/Cabjari Satu Kota Dengan Pengadilan Negeri	657 Perkara	2.569.302.000	
				Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan, Penuntutan dan eksekusi di Kejati Dan Cabjari	657 Perkara	153.426.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	-	-	4.044.650.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kejaksaan Tinggi	12 Kasus	600.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan Dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	12 Perkara	1.200.000.000	



KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan Dan Penuntutan Di Kejaksaan Tinggi	28 Perkara	2.169.140.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan Dan Penuntutan Di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	37.910.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	25.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	10 Perkara	12.600.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	-	-	243.575.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata	Terseleksainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara , Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum	5 perkara	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari dan Cabjari (Litigasi)	60.575.000	KAJATI/ KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	38 perkara	114.000.000	
				Operasional Pos Media informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	132 media	69.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN.				S A S A R A N			FORMULIR RKT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	-	165.850.308.000	KAJATI	
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layana Perkantoran	38 Layanan	163.311.033.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan okum.	-	-	150.000.000	KAJATI	
1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	3 Sasaran/ prasarana	150.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI	
006.01.03	Program Peningkatan dan Penguatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan (Lapdu) yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.	-	-	700.070.000	KAJATI	
1097	Peningkatan Penguatan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan Jaringan Penguatan di Daerah	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan sanaan	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejati, Kejari yang terdapat Cabjari	1 kegiatan 100 Lapdu	210.000.000 340.000.000	KAJATI/KEJAR DAN KACABJARI	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.		Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejati, Kejari yang terdapat Cabjari	20 Lapdu	150.070.000	
L006.0 1.06	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan hukum di Bidang EPOLEKSOSBUD hukum dan hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan okum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati dan Kejari, Cabjari	-	1.222.764.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan okum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya di lingkungan Kejaksaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejari dan Cabjari	39 Laporan	540.024.000	
				Burou Tindak Pidana/DPO yang ditangkap	1 kegiatan	15.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terseleenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari dan Cabjari	65 kegiatan	606.990.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	2199 perkara	7.185.390.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari	2264 perkara	709.570.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	-	-	8.501.950.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	2264 perkara	606.990.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	2199 perkara	7.185.390.000	
				Penegendalian penggunaan upaya hukum, eksekutif dan pelaksanaan eksekusi dai Kejati, Kejari dan Cabjari	2264 perkara	709.570.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	-	-	12.116.760.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	21 perkara	1.050.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyidikan di Kejati	22 perkara	2.200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di Kejari dan Cabjari	37 perkara	1.850.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap penyidikan di Kejari dan Cabjari	106 perkara	3.700.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	6 perkara	21.444.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari /Cabjari negeri Wil I	42 Perkara	3.208.010.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi /tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejari dan Cabjari	49 perkara	86.706.000	
006.01.009	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	-	-	540.575.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	Tersebaiknya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara , Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	20 perkara	242.300.000		KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari dan Cabjari (Litgas)	95 perkara	285.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	66 media	13.275.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

**UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI BALI.**

**FORMULIR RKT**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	-	81.219.356.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layana Perkantoran	10 Layanan	81.022.200.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	-	Persentasi (%) Penedyiaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	-	-	55.658.000	KAJATI
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	55.658.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Peningkatan dan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proporsional dan akuntabel.	-	-	182.400.000	KAJATI
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pelaksanaan Inspeksi.	4 kegiatan	130.720.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	30 Lapdu	44.700.000	



KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akurat, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	5 Lapdu	6.980.000	
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya dilingkungan Kejaksaan RI.	Terselesainya penanganan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	11 laporan	158.104.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Lembaga yang telah diberi Penerimaan Hukum pada Kejati. Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari dan Cabjari	4 kegiatan 17 Kegiatan	37.840.000 160.820.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akurat.	Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari dan TP4D.	3 kegiatan	15.000.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	729 perkara	494.990.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	649 perkara	1.734.420.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari	679 perkara	209.590.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	-	-	2.767.390.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap Penyelidikan di Kejari dan Cabjari	9 Kasus	450.000.000	
			Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari dan Cabjari	9 Perkara	900.000.000		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari	1 perkara	96.500.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	5 perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati, Kejari dan Cabjari	1 perkara	37.910.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari Wil. I	16 perkara	707.040.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari Wil. II	4 perkara	189.600.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	19 perkara	36.340.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	-	-	216.575.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	Terseleksikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara , Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari dan Cabjari (Litigasi)	5 perkara	60.575.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
			Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	33 perkara	127.500.000		
			Operasional Pos Media informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	108 media	28.500.000		

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT		S A S A R A N				FORMULIR RKT	
		TUJUAN	INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	-	53.994.821.000	KAJATI
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejati, Kejari dan Cabjari.	Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layana Perkantoran	7 Layanan	53.121.571.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan.	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	-	-	688.169.000	KAJATI
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 sarana/ prasarana	688.169.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan (Lapdu) yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.	-	-	197.733.000	KAJATI
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan penun-dangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejati, Kejari yang terdapat Cabjari	30 lapdu	102.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui	5 lapdu	37.300.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD hukum dan hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	inspeksi kasus pada Kejati, Kejari yang terdapat Cabjari Pelaksanaan Inspeksi	2 kegiatan	58.433.000	KEJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya di lingkungan Kejaksaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati/Keajari dan Cabjari	8 laporan	37.840.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejari dan Cabjari Pencatatan/penangkapan buron tindak pidana/DPO, yang ditangkap	1 kegiatan	15.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	Penerangan hukum pada Kejaksaan Agung Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari dan Cabjari Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejari dan Kejari, dan TP4D	4 kegiatan 12 Kegiatan 3 kegiatan	37.840.000 113.520.000 15.000.000	KEJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan	-	-	1.889.000.000	KAJATI
				Perkara pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap	559 perkara	323.050.000	KAJATI/ KAJARI DAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Secara Cepat dan Akuntabel	di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Pra Penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari			KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	514 perkara	1.433.245.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari	559 perkara	132.705.000	
<b>006.01.08</b>	<b>Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi</b>	-	<b>Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel</b>	-	-	<b>2.393.210.000</b>	<b>KAJATI</b>
<b>1114</b>	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari dan Cabjari	8 kasus	400.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari, dan Cabjari.	11 perkara	800.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi	6 perkara	93.852.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari Wil. I	3 Perkara	254.160.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	4 perkara	189.600.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	dan penuntutan di Kejari, dan Cabjari Wil II	6 perkara	618.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di kejari, Kejari, dan Cabjari	20 perkara	37.598.000	
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejari, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	Terseleksainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara , Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejari, Kejari maupun Cabjari.	-	-	183.575.000	KAJATI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari/Kejari dan Cabjari (Litigasi)	5 perkara	60.575.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	26 perkara	78.000.000	
				Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	84 media	45.000.000	



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR.				FORMULIR RKT		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	-	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layana Perkantoran	20 Layanan	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	-	-	KAJATI
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	Sarana dan prasarana aparatur Kejaksaan Pusat dan Daerah	19 Sarana/ Prasarana	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Peningkatan dan Penguasaan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.	-	-	KAJATI
1097	Peningkatan Penguasaan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	20 lapdu	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		Jaksa Agung.		Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	5 lapdu	22.839.000	
				Pelaksanaan Inspeksi	23 kegiatan	347.590.000	
006.01.06	Program Penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang EPOLEKSOSBUD hukum dan hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	Program Penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	702.904.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJAR
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya dilingkungan Kejaksaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	21 Laporan	294.504.000	
				Pencarian/pengungkapan buron tindak pidana/DPO, yang ditangkap	1 kegiatan	15.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Lembaga yang telah diberi Penerimaan Hukum pada Kejati.	4 kegiatan	37.840.000	KEJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari dan Cabjari	36 kegiatan	340.560.000	
				Penguatan jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari, dan TP4D	3 kegiatan	15.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	-	-	2.875.400.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan di Kejati	799 perkara	253.350.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan di Kejari dan Cabjari	749 perkara	2.416.105.000	
				Perkara pidana umum,eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejari dan Cabjari	909 perkara	205.945.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	-	-	20.056.370.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi,perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penidikan dan penyidikan di Kejari dan Cabjari	19 perkara	1.900.000.000	
				Kasus tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan dan	19 kasus	950.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				penyidikan di Kejari dan Cabjari	8 Perkara	353.520.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari WII. 1	32 perkara	6.416.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari WII III	4 perkara	50.000.000	
				Perkara Tinak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan Penuntutan di Kejari	8 perkara	37.910.000	
				Perkara tindak pidana korupsi/ tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	20 perkara	48.940.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	-	-	354.575.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum	Terseleksinya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang	5 perkara	60.575.000	KAJATI/KAJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelenggarakan kewibawaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	diselesaikan di Kejati/Kejari dan Cabjari (Litigasi)		DAN KACABJARI	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	61 perkara	183.000.000	
				Operasional Pos Media informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	216 media	111.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

**UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI MALUKU.**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan.	-	-	53.855.043.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Staf Lainnya Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Tertaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layana Perkantoran	156 Layanan	53.237.087.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan taksi dan sarana perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	-	-	11.000.000	KAJATI
1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru.	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah.	1269 Sarana/ Prasarana	11.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Peningkatan dan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proporsional dan akurat.	-	-	382.059.000	KAJATI
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejati, Kejari dan Cabjari	20 lapdu	68.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui	5 Lapdu	37.300.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				inspeksi kasus pada Kejati, Kejari dan Cabjari			
				Pelaksanaan Inspeksi	12 Kegiatan	276.759.000	
006.01.06	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan permasalahannya Hukum dan Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	446.604.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya dilingkungan Kejaksaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	14 laporan	199.024.000	
				Pencarian/penangkapan buron tindak pidana/DPO, yang ditangkap	1 kegiatan	15.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Lembaga yang telah diberi Penyuluhan Hukum pada Kejati.	9 kegiatan	85.140.000	KAJATI/KAJARI/ DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi Penyuluhan Hukum pada Kejari dan Cabjari	14 kegiatan	132.440.000	
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari dan TP4D	3 kegiatan	15.000.000	
006.01.08	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	-	-	1.960.750.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan di Kejati	449 perkara	326.830.000	KAJATI/ KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan Kejati/ Cabjari.	395 perkara	1.412.620.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari.	395 perkara	221.300.000	
006.01.09	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	-	-	5.901.670.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 kasus	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Kasus tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap Penyelidikan di Kejari, dan Cabjari	12 Kasus	600.000.000	
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di Kejari dan Cabjari	12 perkara	1.200.000.000	
			Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	4 perkara		50.000.000	



KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				dan penuntutan di Kejati			
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati, Kejari dan Cabjari.	1 perkara	37.910.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari Wil I.	6 perkara	265.140.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari Wil III	17 perkara	3.408.500.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejati, Kejari dan Cabjari	13 Perkara	40.120.000	
1119	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	-	-	213.575.000	KAJATI
	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	Tersebaiknya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara , Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari dan Cabjari (Litigasi)	5 perkara	60.575.000	KAJATI/KAJARI DAN CABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	34 perkara	102.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	96 media	51.000.0000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2016**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI PAPUA + PAPUA BARAT.		S A S A R A N				FORMULIR RKT	
		INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN					
006.01. 01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	59.898.427.000	KAJATI	
1090	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layanan Perkantoran	59.098.464.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI	
006.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	799.963.000	KACABJARI	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	10.050.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI	
006.01. 03	Program Peningkatan dan Penguasaan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejati, Kejari yang terdapat Cabjari	31.700.000	KAJATI	
1097	Peningkatan Penguasaan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati,	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang	Laporan Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap	73.600.000	KAJATI/KEJAR DAN	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Kejari dan Cabjari.	Kejaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.		pada Kejaksaan Tinggi. Kejaksanaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	penyalahgunaan wewenang di daerah.		KACABJARI
006.01.07	Program penyelidikan/pengamanan/Penggalangan permasalahan hukum di bidang EPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka pendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	Program penyelidikan/pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	3 kegiatan	279.936.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJAR
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya di lingkungan Kejaksaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	15 laporan	171.744.000	
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari dan Cabjari	20 kegiatan	189.200.000	
				Pencarian/penangkapan buron tindak pidana/DPO, yang ditangkap	1 kegiatan	15.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Lembaga yang telah diberi Penyuluhan Hukum pada Kejati.	4 kegiatan	37.840.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari dan Cabjari	20 kegiatan	189.200.000	
				Penguatan jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari, dan TP4D	3 kegiatan	15.000.000	
006.01.08	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	-	-	4.166.000.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	700 perkara	988.750.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan Kejati/Cabjari.	595 perkara	1.878.750.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari	595 perkara	778.204.000	
				Perkara Pidana Umum tertentu yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	18 perkara	59.932.000	
006.01.09	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	Perkara pidana umum tertentu yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari.	18 perkara	482.364.000	KAJATI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejati	12 kasus	600.000.000	
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari dan Cabjari	12 perkara	1.200.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari dan Cabjari	12 perkara	1.200.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi.	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Wil. I	8 Perkara	353.520.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan dan Cabjari Wil III	16 perkara	3.416.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/ tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan, Kejaksaan dan Cabjari	1 perkara	36.650.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan, Kejaksaan dan Cabjari	12 perkara	38.860.000	
1119	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	-	-	243.575.000	KAJATI
	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan, Kejaksaan dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan	Terseleksinya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara , Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejaksaan, Kejaksaan maupun Cabjari.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan/Kejari dan Cabjari (Litigasi)	5 perkara	60.575.000	KAJATI/ KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan/ Kejaksaan	38 perkara	114.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		peraturan Perundang-undangan.		Cabjari (Non litigasi)			
				Operasional Pos Media informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	132 media	69.000.000	

## RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA.				FORMULIR RKT			
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	-	38.591.837.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Jaksa Agung Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layana Perkantoran	9 Layanan	38.098.981.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan.	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	-	-	3.000.000.000	KAJATI
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	Sarana dan prasaranan Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ prasana	3.000.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Peningkatan dan Penguasaan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.	-	-	207.650.000	KAJATI
1097	Peningkatan Penguasaan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang di daerah.	20 lapdu	68.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI



KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		ditetapkan oleh Jaksa Agung.		Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejati, Kejari dan Cabjari	5 Lapdu	37.300.000	
006.01.06	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD hukum dan hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari.	-	354.204.000	KAJATI/KAJARI/ DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Hasil Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya dilingkungan Kejaksaan RI		Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	10 laporan	144.464.000	
				Pencarian/ Penangkapan Buron tindak pidana/ DPO, yang ditangkap	1 Kegiatan	15.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Lembaga yang telah diberi Penyuluhan Hukum pada Kejati.	4 Kegiatan	37.480.000	KAJATI/KAJARI/ DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari dan Cabjari	15 Kegiatan	141.900.000	
				Penguatan jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari, m dan TP4D	3 kegiatan	15.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum.	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	-	-	1.919.300.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel.	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan di Kejati	368 perkara	164.950.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	318 perkara	1.306.120.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari	368 perkara	78.230.000	
				Perkara Pidana Umum tertentu yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan pad Kejati, Kejari dan Cabjari	10 perkara	20.720.000	
				Perkara pidana umum tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	10 perkara	272.980.000	
				Perkara Pidana Umum tertentu yang diselesaikan dalam tahap eksekusi pada Kejati, Kejari dan Cabjari	10 perkara	76.300.000	
006.01.06	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel.	-	-	4.695.130.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	10 perkara	500.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari dan Cabjari	8 perkara	800.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	3 perkara	75.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati, Kejari dan Cabjari	1 perkara	37.910.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari WII I	6 perkara	265.140.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari WII III	14 perkara	2.807.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejati, Kejari dan Cabjari	8 perkara	10.080.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	-	-	213.575.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	Terseleksainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara , Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	5 perkara	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari dan Cabjari (Litigas)	60.575.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				32 perkara	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	96.000.000	
				108 Media	Operasional Pos Media informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	57.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI BANTEN		S A S A R A N				FORMULIR RKT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
006.01. 01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	-	57.288.617.000	
1090	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layana Perkantoran	29 Layanan	56.829.741.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	458.875.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	9 Sarana/ prasarana	26.082.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01. 03	Program Peningkatan dan Penguasaan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.	-	-	131.382.000	KAJATI
1097	Peningkatan Penguasaan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati,	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejati, Kejati	40 lapdu	68.000.000	KAJATI/KAJARI DAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Kejari dan Cabjari.	Kejaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	pada Kejaksanaan Tinggi. Kejaksanaan Negeri dan Cabang Kejaksanaan Negeri	yang terdapat Cabjari	5 lapdu	37.300.000	CABJARI
006.01.06	Program penyidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	Program penyidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	298.544.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJAR
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya dilingkungan Kejaksaan RI.	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksanaan Negeri dan Cabang Kejaksanaan Negeri	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	8 laporan	117.184.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Pencarian/pengamanan buron tindak pidana/DPO, yang ditangkap	1 kegiatan		
				Lembaga yang telah diberi Penyuluhan Hukum pada Kejari dan Cabjari	16 Kegiatan	151.360.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Penguatan jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari, dan TP4D	10 Lembaga	15.000.000	
006.01.	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat,	-	-	4.257.500.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
07	Umum		tepat dan akuntabel.				
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap Pra penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	1255 perkara	392.255.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	1165 perkara	3.524.803.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari	1255 perkara	340.442.000	
006.01.06	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	-	-	2.027.510.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	3 perkara	150.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap Penyelidikan di Kejari dan Cabjari	6 Perkara	300.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari dan Cabjari	6 perkara	600.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kasus tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kajati dan Cabjari	16 perkara	707.040.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati, Kejari dan Cabjari.	2 perkara	37.910.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	1 perkara	25.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	6 perkara	7.560.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	-	-	183.575.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata	Terseleksinya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Kegiatan perimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari dan Cabjari (Litigasi)	5 perkara	60.575.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI



KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	20 perkara	78.000.000	
				Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	84 Media	45.000.000	

## RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG				FORMULIR RKT		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI		Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan		46.745.054.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layana Perkantoran	46.745.054.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan		Jumlah laporan pengaduan (Lapdu) yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.		161.118.000	KAJATI
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klari fikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	68.000.000	KAJATI/KEJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang EPOLEKOSBUD Hukum dan Hankam		Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka pendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology,represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan.	Pelaksanaan Inspeksi  Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi Kejari yang terdapat Cabjari	55.818.000  37.300.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJAR
006.01.06					354.204.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Pengalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Pengamanan dan Pengalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya dilingkungan Kejaksaan RI	Terselenggaranya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/ pengalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ pengamanan/ pengalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	13 Laporan	144.464.000	
				Pencarian/penangkapan buron tindak pidana/DPO	1 kegiatan		30.000.000
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	1 kegiatan		15.000.000
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	4 Kegiatan	37.740.000	
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari dan Cabjari	15 Kegiatan		141.900.000
				Penguatan jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari dan TP4D	3 Kegiatan		15.000.000
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum		Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.			3.010.550.000	
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	662 perkara	667.205.000	
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	462 perkara		2.145.385.000
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi dan Kejati/Kejari dan Cabjari	562 perkara		187.960.000
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang		Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang			2.674.730.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi		berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel				
	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan Kejaksaan Tinggi	4 perkara	199.796.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	3 perkara	300.204.000	
				Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari/Cabjari	8 Kasus	400.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari/Cabjari	8 Perkara	800.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan di Kejari/Cabjari	1 perkara	3.364.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap pra Penuntutan di Kejari/Cabjari	5 perkara	3.364.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejati	5 perkara	62.500.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari/ Cabjari Wilayah I	14 Perkara	827.580.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejati/Cabjari Wilayah II	1 Perkara	44.036.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejati, Kejari dan Cabjari	8 Perkara	10.080.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejati/ Kejari dan Cabjari	10 perkara	27.170.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara		Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.			201.575.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara , Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari dan Cabjari (Litigasi)	5 perkara	60.575.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	30 perkara	90.000.000	
				Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	96 media	51.000.000	

## RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

### UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO.

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		ALOKASI ANGGARAN
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	-	36.911.523.000	
1090	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejari dan Cabjari.	Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layana Perkantoran	84 Layanan	36.656.360.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	-	-	75.000.000	
1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ prasarana	75.000.000	
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan (Lapdu) yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akuntabel.	-	-	144.701.000	
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	20 lapdu	56.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		Jaksa Agung.		Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	5 lapdu	32.300.000	
				Pelaksanaan Inspeksi	4 Kegiatan	56.401.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan Hukum di Bidang EPOLEKSOSBUD hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	298.544.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas dan Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya di lingkungan Kejaksaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/ pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	8 laporan	117.184.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terseleenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Pencatatan/penangkapan/ buron tindak pidana/DPO, yang ditangkap	1 kegiatan	15.000.000	
				Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	16 Kegiatan	151.360.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Penguatan jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari, dan TP4D	2 kegiatan	15.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	-	-	1.234.750.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	350 perkara	160.910.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	200 perkara	1.028.050.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, ekseaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari	190 perkara	45.790.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	-	-	2.178.170.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	3 perkara	150.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Kasus tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di Kejari dan Cabjari	6 Kasus	300.000.000	
				Kasus tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejari dan Cabjari.	6 perkara	600.000.000	



KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari.	4 perkara	74.270.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari Wil I	6 perkara	265.140.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari Wil II	3 perkara	265.140.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan di Kejari dan Cabjari Wil III	5 perkara	401.250.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	10 perkara	7.560.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	1 perkara	37.750.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	-	-	123.345.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	Terseleksainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara , Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	1 perkara	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari dan Cabjari (Litigasi)	9.345.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				23 perkara	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	69.000.000	
				12 Bulan layanan	Operasional Pos Media informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	45.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU.		S A S A R A N			FORMULIR RKT		
		TUJUAN	INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
006.01. 01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	-	41.798.053.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Operasional, Peneliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di unit kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Layana Perkantoran.	108 Layanan	40.581.733.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	-	Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di Daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional Roda-4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.	-	-	100.000.000	-
1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	Sarana dan Prasarana Pelaksanaan di Pusat dan Daerah	20 Sarana/ Prasarana	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01. 03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan (Lapdu) yang ditindaklanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proposional dan akurat.	-	-	284.173.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalarungunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pelaksanaan Inspeksi.  Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi klarifikasi pada Kejati, Kejari yang terdapat Cabjari	144.900.000 102.000.000	KAJATI/KEJARI DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideology, politik, media massa, barang cetakan, orang asing cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan Kejati, Kejari dan Cabjari	-	335.284.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data Berupa Bukti Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya di lingkungan Kejaksaan RI	Terselesainya penanganan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	10 Laporan	144.464.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.	Pencarian /penangkapan buron tindak pidana/DPO	1 Kegiatan	30.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi	20 Kegiatan	160.820.000	KEJATI/KAJARI DAN KACABJARI
						3.198.850.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat dan Akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Negeri.	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	691. perkara	299.190.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	616 Perkara	2.065.310.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari	626 perkara	94.350.000	
006.01.06	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	Perkara Pidana Umum tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati, Kejari, Cabjari	10 perkara	370.000.000	KAJATI
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	10 Perkara	370.000.000	
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat, secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana Khusus	12 kasus	399.520.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Yang Diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan Di Kejari dan Cabjari			
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap penyidikan di kejari/cabjari	12 perkara	800.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra Penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 perkara	214.830.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati, Kejari dan Cabjari	2 perkara	49.840.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari dan Cabjari WII III	16 perkara	2.362.980.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusu lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejati, Kejari, dan Cabjari	18 perkara	35.080.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	-	-	177.575.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatkan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum Kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata	Terseleksinya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara , Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari (Litigas)	3 perkara	60.575.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.	lain yang diselesaikan di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari dan Cabjari (non litigasi)	21 perkara	78.000.000	
				Operasional Pos Media Informatasi dan Pelayanan Hukum Gratis.	72 media	39.000.000	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

H.M. PRASETYO

## RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017

**Instansi** : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

**Visi** : "Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel".

**Misi** :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian MasalahPerdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

### FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI.	-	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	543.858.057.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
1080	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerjasama Hukum.	Meningkatkan Penelitian Pengembangan, serta Kerja Sama Hukum yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	Jumlah Kerja sama hukum sebagai implementasi MLA dalam rangka pengembalian terdakwa/tersangka dan asset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan diluar negeri.	Kerja sama hukum untuk penyusunan kesepakatan MLA dalam rangka penelusuran dan pengembalian asset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan diluar negeri.	1.016.000.000	KARO HUKUM DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI



2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		Aparatur Kejaksaan, Terutama Dalam Upaya Penegakan Hukum.	Jumlah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan penelaahan.	Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan penelaahan.	2 rancangan peraturan	1.372.759.000	
1081	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari.	Pengembangan manajemen kepegawaian, baik rekrutmen, asesmen hingga jenjang karier dalam rangka penguatan cetak biru ( <i>blue-print/road map</i> pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan).	Jumlah laporan manajemen kepegawaian yang terkait dengan pengimplementasian blueprint mengenai pola rekrutmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat.	Laporan manajemen kepegawaian dan pembinaan pegawai.	12 laporan	23.956.700.000	KARO KEPEGAWAIAN
1082	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI	Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Hasil Penanganan Perkara, Baik Terkait dengan Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana tertentu lainnya, serta Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam hal Pembayaran Uang Pengganti (PUP) dan hasil lainnya yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Pemanfaatan Asset Milik Negara yang dikuasai oleh Kejaksaan	Laporan pengelolaan keuangan dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran, operasional menteri dan pimpinan serta pelaporan realisasi anggaran.	Laporan Pengelolaan Keuangan	12 laporan	9.921.574.000	
			Laporan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Laporan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan.	12 laporan	793.390.000	KARO KEUANGAN
			Pembayaran gaji dan hak-hak keuangan pegawai.	Layanan perkantoran	12 bulan layanan	380.240.024.000	
1083	Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi Dan Tata Laksana, Pengolahan Data	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Terkait dengan Manajemen Kepegawaian,	Jumlah Peraturan perundang-undangan Pembentukan Satuan Kerja Baru.	Peraturan undangan Pembentukan Satuan Kerja Baru.	1 peraturan	676.985.000	KARO PERENCANAAN

3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	serta Pemantauan dan Penilaian	Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pemberian Hak-hak Keuangan Pegawai, Pengembangan Organisasi dan Tata laksana serta Pengolahan Data, Pemantauan dan Penilaian Kinerja bidang Pembinaan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kejaksaan RI. Laporan Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja. Laporan Hasil Pengelolaan Data Yang terkait dengan Penyusunan Rencana dan Program, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana.	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kejaksaan RI. Laporan Pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja. Dokumen Pengelolaan Data, Penyusunan Rencana dan Program, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana.	1 dokumen 1 laporan 1 laporan	3.498.432.000 833.550.000 1.932.980.000	
1084	Pembinaan dan Pengelolaan Pertengkapan Kejaksaan RI	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan, Terutama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Pemenuhan kebutuhan pokok pegawai Kejaksaan RI.	Pemenuhan kebutuhan pokok pegawai Kejaksaan RI.	12 bulan layanan	20.598.151.000	KARO PERLENGKAPAN
1085	Pelayanan Ketatausahaan RI, Pimpinan, Kerumahahtagaan, Keamanan dan Bina Kesejahteraan Pegawai	Terlaksananya tugas-tugas dan ketatausahaan dalam kerumahahtagaan terhadap pimpinan di lingkungan Kejaksaan menyediakan fasilitas kesehatan.	Pelayanan Kesekretariatan, Protokol, Bina Kesejahteraan Pegawai dan Pimpinan.	Layanan Kesekretariatan, Keamanan, Protokol, Bina Kesejahteraan Pegawai dan Pimpinan	12 bulan layanan	3.125.001.000	KARO UMUM

4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Terkait dengan Manajemen Kepegawaian, serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembayaran langganan daya dan jasa.	Layanan Perkantoran	12 bulan layanan	48.507.022.000
		Terlaksananya tugas-tugas ketatausahaan dan kerumaha-tanggaan dalam rangka pelayanan terhadap Pimpinan di lingkungan Kejaksaan Agung.	Jumlah telaahan dan pengkajian oleh Staf Ahli Jaksa Agung RI	Penyusunan telaahan dan pengkajian oleh Staf Ahli Jaksa Agung RI	4 kegiatan	180.080.000
1088	Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terutama Pembinaan yang Berbasis Teknologi Informasi (TI) di Seluruh Satuan Kerja Kejaksaan dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Kinerja, Termasuk Penanganan Perkara	Jumlah data perkara yang disajikan berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal).	Sistem informasi mengenai data perkara yang disajikan berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal).	1 sistem informasi	6.194.000.000
				Layanan Data dan Informasi	1 layanan	1.410.755.000
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Terkait dengan Manajemen Kepegawaian, serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembayaran langganan daya dan jasa.	Layanan Perkantoran	12 bulan layanan	29.962.593.000

KAPUS  
DASKRIMTI

5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1089	Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia	Meningkatnya penelitian, pengkajian, pengembangan, pengkajian, keilmuan dan kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Kegiatan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya.	Hasil Pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan.	9 laporan	1.971.250.000	KAPUS LITBANG
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terlaksananya tugas Jaksa Agung Muda Pembinaan di bidang kesekretariatan secara lebih efektif serta tersedianya data yang valid untuk diadikan bahan pertimbangan Jaksa Agung Muda Pembinaan dalam mengambil Kebijakan Teknis.	Jumlah Pelayanan kesekretariatan di bidang Jaksa Agung Muda Pembinaan.	Pelayanan kesekretariatan di bidang Jaksa Agung Muda Pembinaan	12 bulan layanan	856.800.000	SESJAM PEMBINAAN
5276	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset Yang Terkait Perkara			Jumlah laporan penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait dengan hasil kejahatan	1 laporan	2.200.230.000	KEPALA PUSAT PEMULIHAN ASET
				Pelayanan Ketatausahaan dan Birokrasi serta penyusunan Rencana Program Kerja dan Anggaran pada Pusat Pemulihan Aset	12 bulan	134.310.000	

6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan		<p>Persentasi (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka penunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI.</p> <p>Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, pusat, Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional roda-4, Kendaraan tahanan serta sarana perengkap gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum</p>		2.648.431.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN,
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Hukum	Jumlah pengadaan sarana perengkapan dan peralatan.	Kendaraan bermotor	702.970.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN,
				Pengadaan alat kesehatan Laboratorium, poli gigi	773.220.000	
				Peralatan dan fasilitas perkantoran	330.744.000	
				Gedung / Bangunan	400.000.000	
				Data dan Informasi	441.497.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara	-	5.472.529.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1120	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	Meningkatkan administrasi Perkara perdata dan tata usaha negara secara baik, akurat, tertata rapi, dan akuntabel	secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara.	Kegiatan pelayanan kesekretariatan di bidang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	12 bulan layanan	1.721.089.000	SESJAM DATUN
1116	Penanganan Pemulihan dan Perlindungan Hak.	Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang dalam Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain kepada instansi Pemerintah/BUMIN/BUIMD, Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat serta Melakukan Penegakan Hukum Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku	Jumlah Perkara Pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan	Perkara Pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung (Litigasi dan Non Litigasi).	96 perkara	1.559.040.000	DIREKTUR PEMULIHAN DAN PERLINDUNGAN HAK
1117	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata		Jumlah Perkara perdata yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung	Perkara perdata yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung (Litigasi dan Non Litigasi).	75 perkara	1.218.000.000	DIREKTUR PERDATA
1118	Peningkatan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara		Perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung	Perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung.	60 perkara	974.000.000	DIREKTUR TATA USAHA NEGARA

**RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2017**

**Instansi** : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

**Visi** : "Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel".

- Misi** :
1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
  2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
  3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
  4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
  5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

**FORMULIR RKT**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT VOLUME/ SATUAN		
006.01. 06	Program Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	-	Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideologi, politik, media massa, barang cetakan, orang asing, cegah tangkai, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan	-	22.955.243.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELLIJEN

2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1104	Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Intelijen	Meningkatkan Tertib administrasi Kegiatan Intelijen Kejaksaan yang meliputi, Pengamanan dan Penggalangan, termasuk penyelidikan intelijen dalam penanganan kasus secara baik, akurat, tertata rapi, dan akuntabel	Pelaksanaan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen sesuai peraturan yang berlaku.	Pelayanan kesekretariatan di bidang Jaksa Agung Muda Intelijen.	12 bulan layanan	6.456.012.000	SESJAM INTELIJEN
1099	Pelaksanaan Kegiatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana.	Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang Komprehensif Dilengkapi dengan Data Berupa Bukti Hukum dan Fakta Hukum yang Valid dan Optimal, serta Mampu Menciptakan Suasana Kondusif yang Dapat Mendukung Keberhasilan Proses Penegakan Hukum yang diakibatkan oleh bidang lainnya di Lingkungan Kejaksaan RI	Jumlah Kegiatan Intelijen di bidang penyelamatan keuangan negara dan penanggulangan tindak pidana	Laporan Hasil Kegiatan Intelijen bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.	50 lnhk	806.000.000	DIREKTUR I
				Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana.	70 laporan	2.635.700.000	
1101	Pelaksanaan Kegiatan Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi.	-	Jumlah operasi intelijen di bidang ideologi, sosial, politik, pertahanan keamanan dan ketertiban umum tepat waktu.	Laporan hasil operasi intelijen bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.	50 lnhk	1.075.000.000	DIREKTUR II
				Pengawasan aliran kepercayaan di Kejaksaan Agung	8 laporan	711.200.000	
1100	Pelaksanaan Kegiatan Sandi dan Produksi Sarana Intelijen.	-	Jumlah kegiatan sandi dan produksi intelijen yang disesuaikan.	Laporan hasil kegiatan produksi dan sarana terhadap pelaksanaan Intelijen	85 lnhk	1.402.000.000	DIREKTUR III



3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.	Meningkatkan Hukum Masyarakat dan Fungsi Kehumasan Kesadaran	Penerangan Hukum Pada Kejaksaan Agung RI. Media/Sarana penyuluhan dan Penyebaran informasi Hukum di Kejaksaan Agung.	Pada Hukum Kejaksaan Agung RI. Media/Sarana penyuluhan dan Penyebaran informasi Hukum	12 bulan layanan 16 lembaga 10 media	2.430.900.000 3.534.926.000 2.354.705.000	KAPUSPENKUM

## RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017

**Instansi** : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

**Visi** : "Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel".

**Misi** :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

### FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	-	22.983.986.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
1109	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Meningkatkan administrasi perkara pidana umum secara akurat, tertata rapi, dan akuntabel	Jumlah kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sesuai peraturan yang berlaku khususnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.	Pelayanan Kesekretariatan bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	9.740.706.000	SESJAM PIDUM

2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
1105	Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda	Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan	Jumlah Perkara Tindak Pidana Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam tahap pra Penuntutan.	Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan	2.001.000.000	DIREKTUR TINDAK PIDANA KAMNEGTIBUM, ORHADA DAN TPUL
1106	Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum		Jumlah Perkara Tindak Pidana Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan.	Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan	6.181.800.000	DIREKTUR TINDAK PIDANA KAMNEGTIBUM, ORHADA DAN TPUL
1107	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya		Jumlah Perkara Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum.	Perkara terorisme dan tindak pidana lintas negara	4.983.840.000	DIREKTUR TINDAK PIDANA KAMNEGTIBUM, ORHADA DAN TPUL
			Jumlah perkara Tindak Pidana Umum Lainnya	Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya	76.640.000	DIREKTUR TINDAK PIDANA KAMNEGTIBUM, ORHADA DAN TPUL

## RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017

**Instansi** : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

**Visi** : "Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel".

**Misi** :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

### FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	-	Jumlah Penyelesaian penanganan korupsi, tindak pidana khusus lainnya, serta pelanggaran HAM yang berat secara lebih cepat, profesional, efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel	-	28.446.229.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
1115	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Meningkatkan administrasi perkara pidana khusus secara baik, akurat, tertata rapi dan akuntabel	Jumlah Pelayanan kesekretariatan bidang Jaksa Agung Muda Pidana Khusus	Pelayanan kesekretariatan bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	4.493.939.000	SESJAM PIDSUS
1110	Penanganan Penyelidikan dan	Meningkatkan penyelesaian	Jumlah Perkara tindak pidana	Perkara tindak pidana korupsi	1.684.000.000	DIREKTUR

2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Penyidikan Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Penyidikan Pelanggaran HAM Berat.	penanganan perkara tindak pidana khusus, Tindak Pidana Korupsi, dan Perkara Pelanggaran HAM baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan	korupsi yang diselesaikan dalam tahap penyidikan.	yang diselesaikan dalam tahap penyidikan.		PENYIDIKAN	
			Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penyidikan di Kejaksaan Agung	Perkara tindak perkara korupsi yang diselesaikan dalam tahap penyidikan di Kejaksaan Agung	75 perkara	6.750.000.000	
			Jumlah Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan dalam tahap penyidikan	Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan dalam tahap penyidikan	3 perkara	101.040.000	
			Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan dalam tahap penyidikan	Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan dalam tahap penyidikan	40 perkara	3.280.000.000	
			Jumlah Perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan dalam tahap penyidikan.	Perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan dalam tahap penyidikan	2 perkara	200.000.000	
			Jumlah perkara pra peradilan perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya/pelanggaran HAM yang berat	Penanganan perkara pra peradilan perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya/pelanggaran HAM yang berat	25 perkara	245.250.000	
1111	Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung.	Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta terciptanya suatu kondisi penegakan hukum, khususnya	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	140 perkara	8.806.000.000	DIREKTUR PENUNTUTAN
			Jumlah Perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat yang diselesaikan dalam tahap pra	Perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat yang diselesaikan dalam tahap pra	1 perkara	54.200.000	

3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
		dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang didukung oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan masyarakat	penuntutan dan penuntutan Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	penuntutan dan penuntutan Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	1.506.000.000	
1113	Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi (Pidana Korupsi).	Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat.	Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan (Kategori A)	Pelaksanaan upaya hukum perkara tindak pidana korupsi/ tindak khusus lainnya/ pelanggaran HAM yang berat	495.300.000	DIREKTUR EKSEKUSI DAN EKSAMINASI
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak khusus lainnya/pelanggaran HAM yang berat terpidana tidak ditahan dalam rutan di Kejaksaan	200.500.000	
				Pelaksanaan eksaminasi umum perkara tindak pidana korupsi/ tindak pidana khusus lainnya/ pelanggaran HAM yang berat di Kejaksaan Agung	125.000.000	
				Pelaksanaan eksaminasi khusus perkara tindak pidana korupsi/ tindak pidana khusus lainnya/ pelanggaran HAM yang berat di Kejaksaan Agung	505.000.000	



## RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017

**Instansi** : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

**Visi** : "Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel".

**Misi** :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

### FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	-	Jumlah laporan pengaduan (Lapdu) yang ditindak lanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proporsional dan akuntabel.	-	10.391.921.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN
1098	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI	Jumlah pelayanan kesekretariatan di bidang Jaksa Agung Muda Pengawasan	Pelayanan kesekretariatan di bidang Pengawasan	9.227.921.000	SESJAM PENGAWASAN
1092	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di wilayah I		Jumlah Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai dan penyalahgunaan	Penangan Laporan Pengaduan masyarakat atas pelaksanaan tugas pokok dan wewenang di wilayah I	133.200.000	INSPEKTUR I



2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			jabatan dan wewenang di wilayah I	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus wilayah I	12 lapdu	99.600.000	
1093	Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah II		Jumlah Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang di wilayah II	Penangan Laporan Pengaduan masyarakat atas pelaksanaan tugas pokok dan wewenang di wilayah II Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus wilayah II	36 lapdu	133.200.000	INSPEKTUR II
1094	Peningkatan Pelaksanaan Tugas pokok dan wewenang di wilayah III.		Jumlah Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang di wilayah III	Penangan Laporan Pengaduan masyarakat atas pelaksanaan tugas pokok dan wewenang di wilayah III Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus wilayah III	100 lapdu	133.200.000	INSPEKTUR III
1095	Peningkatan Pelaksanaan Tugas pokok dan wewenang di wilayah IV.		Jumlah Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang di wilayah IV	Penangan Laporan Pengaduan masyarakat atas pelaksanaan tugas pokok dan wewenang di wilayah IV Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus wilayah IV	100 lapdu	133.200.000	INSPEKTUR IV

3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1096	Peningkatan Pelaksanaan Tugas pokok dan wewenang di wilayah V.		Jumlah Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang di wilayah V	Penangan Laporan Pengaduan masyarakat atas pelaksanaan tugas pokok dan wewenang di wilayah V	100 lapdu	133.200.000	INSPEKTUR V
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus wilayah V	12 lapdu	99.600.000	

**RENCANA KERJA BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI TAHUN 2017**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
006.01.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional.		115.600.628.000	KEPALA BADAN DIKLAT
5006	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia Kejaksaan.	Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan teknis fungsional.	Jumlah Diklat HAM untuk Jaksa	480.783.000	KEPALA BADAN DIKLAT
				Jumlah Diklat Agakum untuk penanganan perkara yang mendukung SPPT	480.783.000	
				Diklat Penanganan ABH berdasarkan berdasarkan UU SPPA	480.783.000	
5007	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepimimpinan		Jumlah pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan	Jumlah pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa yang Diselenggarakan	33.134.792.000	SEKRETARIS BADAN DIKLAT/ KEPALA PUSAT DIKLAT
				Diklat Teknis Aparatur Kejaksaan	9.397.791.000	
5008	Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan, terutama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Pelayanan dalam terselenggaranya urusan umum, anggaran, kepegawatan, pengelolaan perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi serta perlengkapan, perpustakaan dan	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepimimpinan	8.760.145.000	KEPALA BADAN DIKLAT
				Layanan Perkantoran	62.042.651.000	
				Data dan informasi	803.628.000	
				Peralatan dan fasilitas	1.746.250.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		penegakan hukum	dokumentasi, serta sarana dan prasarana.	perkantoran			
				Gedung/Bangunan	7 paket	1.163.015.000	
				Layanan dukungan Manajemen Eselon I	12 layanan	2.229.500.000	

**RENCANA KERJA PERWAKILAN KEJAKSAAN RI DI BANGKOK TAHUN 2017**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
006.01.01	Program Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan, terutama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan dan jumlah pelayanan kesekretariatan Perwakilan Kejaksaan RI di Bangkok	Layanan Perkantoran	2.123.508.000	KEPALA PERWAKILAN KEJAKSAAN RI DI BANGKOK
1080	Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Perwakilan Kejaksaan RI di Bangkok					

FORMULIR RKT

**RENCANA KERJA PERWAKILAN KEJAKSAAN RI DI HONGKONG TAHUN 2017**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
006.01.01	Program Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan, terutama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan dan jumlah pelayanan kesekretariatan Perwakilan Kejaksaan RI di Bangkok	Layanan Perkantoran	2.170.124.000	KEPALA PERWAKILAN KEJAKSAAN RI DI HONGKONG
1080	Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Perwakilan Kejaksaan RI di Hongkong					

**RENCANA KERJA PERWAKILAN KEJAKSAAN RI DI RIYADH TAHUN 2017**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
006.01.01	Program Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan, terutama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan dan jumlah pelayanan kesekretariatan Perwakilan Kejaksaan RI di Bangkok	Layanan Perkantoran	2.265.372.000	KEPALA PERWAKILAN KEJAKSAAN RI DI RIYADH
1080	Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Perwakilan Kejaksaan RI di Riyadh					